

**EKSKLUSI SOSIAL TERHADAP KELUARGA PRASEJAHTERA  
(STUDIKASUS: DESAPADANG KABUPATEN BULUKUMBA)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi*

**Oleh**

**NURWANDAYANI**

**105381100121**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

**EKSKLUSI SOSIAL TERHADAP KELUARGA PRASEJAHTERA  
(STUDI KASUS: DESA PADANG KABUPATEN BULUKUMBA)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi*

**Oleh**  
**NURWANDAYANI**  
**105381100121**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Nurwandayani, 105381100121 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 524 Tahun 1447 H/2025 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujian pada hari Senin, 25 Agustus 2025 dan Yudisium pada hari Sabtu, 06 September 2025.

02 Rabi'ul Awal 1447 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
25 Agustus 2025 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M. IPU (.....)


Ketua : Dr. H. Baharullah, M. Pd. (.....)

Sekretaris : Dr. Andi Nurhidayah, M. Pd. (.....)

Penguji

1. Dr. Jamaluddin Arifin, M. Pd. (.....)
2. Dr. Hj. Fatmahanis, M. Pd. (.....)
3. Dr. Nurhuda, M. Pd. (.....)
4. Dr. Suardi, M. Pd. (.....)

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Dr. H. Baharullah, M. Pd.  
NBM: 779 170

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Dr. Jamaluddin Arifin, M. Pd.  
NBM: 117 4893





### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Eksklusi Sosial terhadap Keluarga Prasejahtera: Studi Kasus Desa Padang, Kabupaten Bulukumba  
Nama : Nurwandayani  
NIM : 105381100121  
Prodi : Pendidikan Sosiologi  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

05 Rabi'ul Awal 1447 H

Makassar,

25 Agustus 2025 M

Pembimbing I

Dr. Hj. Fatimah Azis, M.Pd.

Pembimbing II

Dr. Syarifuddin, M.Pd.

Mengetahui:

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Baharullah, M. Pd.  
NBM: 779 170

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

Dr. Jamiluddin Arifin, M.Pd  
NBM: 117 4893



## SURAT PERJANJIAN

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Nurwandayani  
Stambuk : 105381100121  
Jurusan : Pendidikan Sosiologi  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 04 Agustus 2025

Nurwandayani



## SURAT PERNYATAAN

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Nurwandayani

Stambuk 105381100121

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Dengan Judul : **Eksklusi Sosial Terhadap Keluarga Prasejahtera di Desa Padang  
Kabupaten Bulukumba**

Dengan menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 04 Agustus 2025

Nurwandayani

## ABSTRAK

**Nurwandayani, 2025.** Eksklusi Sosial Terhadap Anggota Keluarga Prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba. Di bimbing oleh Fatimah Azis, sebagai pembimbing I dan Syarifuddin sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis bentuk-bentuk eksklusi sosial yang dialami oleh keluarga prasejahtera di Desa Padang, Kabupaten Bulukumba. Eksklusi sosial merupakan fenomena yang kompleks, di mana individu atau kelompok masyarakat tertentu terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks ini, keluarga miskin mengalami hambatan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak, sehingga memperkuat siklus kemiskinan dan keterasingan sosial yang mereka alami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap anggota keluarga prasejahtera dan informan terkait di Desa Padang. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin dengan teknik triangulasi sumber, waktu, teori, dan pakar. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, struktur kekuasaan, serta faktor-faktor penyebab eksklusi yang bersifat struktural maupun kultural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk eksklusi sosial yang dialami keluarga prasejahtera meliputi keterbatasan akses terhadap layanan publik, pengucilan dalam kehidupan sosial, serta ketidakberdayaan dalam partisipasi politik dan ekonomi. Faktor penyebabnya antara lain ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya pendidikan, diskriminasi sosial, dan lemahnya kebijakan inklusif dari pemerintah setempat. Temuan ini menunjukkan bahwa eksklusi sosial tidak hanya bersumber dari kondisi ekonomi semata, melainkan juga dari relasi sosial dan struktur kekuasaan yang tidak berpihak kepada kelompok rentan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat prasejahtera.

**Kata Kunci:** Eksklusi Sosial, Keluarga Prasejahtera, Kemiskinan, Desa Padang



## ABSTRACT

**Nurwandayani, 2025.** Social Exclusion of Underprivileged Families in Padang Village, Bulukumba Regency. *Supervised by Fatimah Azis as Supervisor I and Syarifuddin as Supervisor II.*

This study aims to uncover and analyze the forms of social exclusion experienced by underprivileged families in Padang Village, Bulukumba Regency. Social exclusion is a complex phenomenon, in which individuals or certain community groups are marginalized from access to social, economic, political, and cultural resources. In this context, poor families experience barriers in accessing basic services such as education, health care, housing, and decent employment, thus reinforcing the cycle of poverty and social alienation they experience.

This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation with underprivileged family members and related informants in Padang Village. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured using triangulation techniques of sources, time, theory, and experts. The primary focus of this research is to deeply understand social dynamics, power structures, and the structural and cultural causes of exclusion.

The results show that forms of social exclusion experienced by underprivileged families include limited access to public services, social exclusion, and powerlessness in political and economic participation. These contributing factors include socioeconomic inequality, low education, social discrimination, and weak inclusive policies from local governments. These findings demonstrate that social exclusion stems not only from economic conditions but also from social relations and power structures that are unfavorable to vulnerable groups. This research is expected to provide a basis for policymaking that is fairer and more pro-prosperous to underprivileged communities.

**Keywords:** Social Exclusion, Underprivileged Families, Poverty, Padang Village

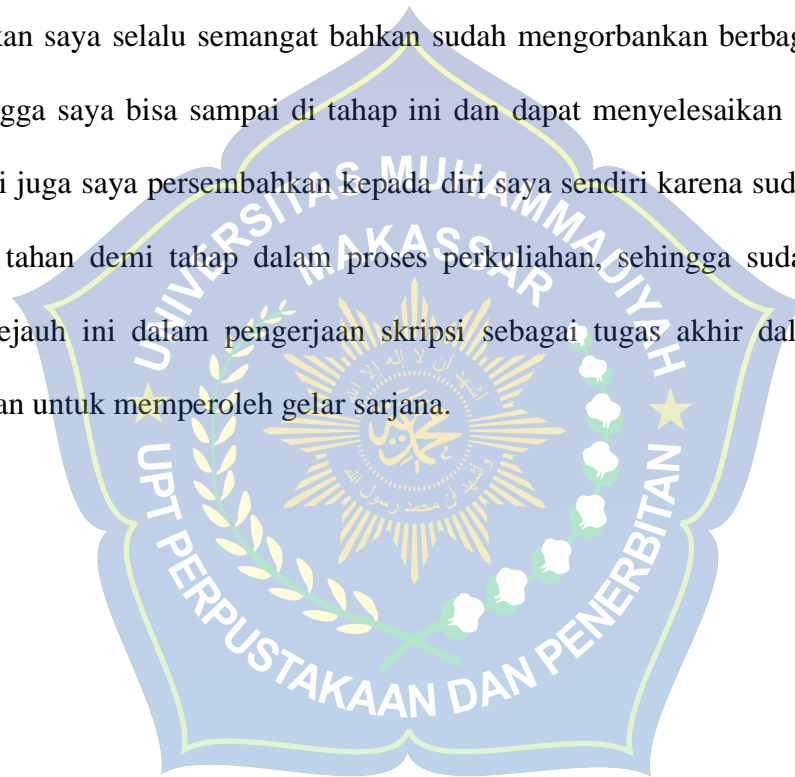


## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Jadilah wanita berkelas, tidak punya pacar tapi banyak yang naksir.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah yang pertama kali dibuat oleh penulis. Penulisan skripsi ini pun tidak mudah dilakukan oleh penulis, maka dari itu skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya yang telah mendorong dan memberikan saya selalu semangat bahkan sudah mengorbankan berbagai macam hal, sehingga saya bisa sampai di tahap ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada diri saya sendiri karena sudah mampu melewati tahan demi tahap dalam proses perkuliahan, sehingga sudah mampu bertahan sejauh ini dalam pengerjaan skripsi sebagai tugas akhir dalam proses perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana.



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dengan berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Eksklusi Sosial Terhadap Anggota Keluarga Prasejahtera studi kasus Desa Padang Kabupaten Bulukumba”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Sosiologi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

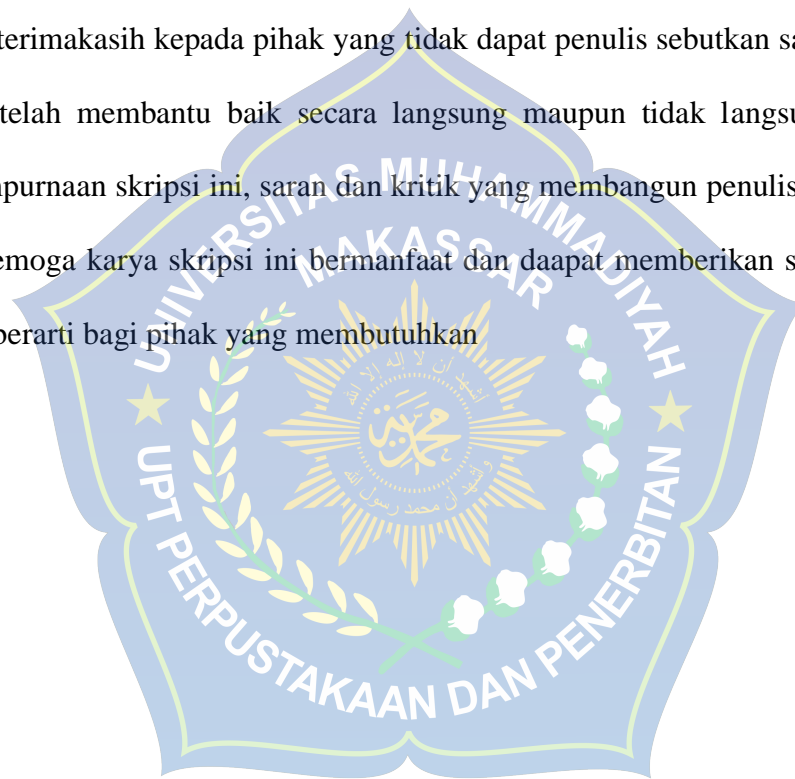
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Semangat dan dorongan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Selain itu, bantuan moril maupun materi yang diberikan telah mempermudah jalannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, di antaranya:

1. Saya mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah Agus dan Ibu Sulmaeni Tawil, yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Terima kasih atas cinta yang tulus, pengorbanan tanpa batas, dan dukungan yang tiada henti dalam segala keadaan. Tanpa restu, kasih sayang, serta doa dari Ayah dan Ibu saya tidak akan mampu melewati proses panjang penyusunan skripsi ini. Setiap tetes keringat dan perjuangan saya adalah wujud

dari impian dan harapan yang Ayah dan Ibu titipkan sejak awal. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah Ayah dan Ibu berikan dengan keberkahan dunia dan akhirat.

2. Kepada Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT, IPU selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Kepada Bapak Dr. H. Baharullah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi dan bapak Dr. Sam'un Mukraimin, M.Pd. selaku sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
5. Ibu Dr. Fatimah Aziz, M.Pd dan Bapak Dr. Syarifuddin, M.Pd., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan arahan serta motivasi atas penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada seluruh informan dan pegawai kantor Desa Padang Kabupaten Bulukumba yang telah banyak membantu, kemudahan serta kelancaran dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teman seperjuangan telah kebersamai, terima kasih sudah menemani hari-hari dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Terima kasih sudah saling menyemangati dan saling berjuang hingga saat ini.

8. Terakhir kepada diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terimakasih telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.
9. Serta terimakasih kepada pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan, dan semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERJANJIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kajian Konsep.....	16
B. Kajian Teori.....	28
C. Kerangka Pikir.....	34
Gambar 1.1 Skema Kerangka Piki.....	37
D. Penelitian Terdahulu .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
C. Fokus Penelitian .....	43
D. Data dan Sumber Data.....	43
E. Informan Penelitian .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Teknik Keabsahan Data.....	48
I. Intrumen Penelitian .....	49

J. Etika Penelitian .....	50
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
A. Sejarah Lokasi Penelitian .....	52
B. Keadaan Geografis .....	54
C. Keadaan Penduduk.....	56
D. Kondisi Ekonomi .....	56
E. Pemerintahan.....	57
<b>BAB V.....</b>	<b>59</b>
A. Hasil Penelitian .....	59
B. Pembahasan.....	83
<b>BAB VI.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>114</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ekstensi sosial atau yang disebut dengan marginalisasi sosial adalah sebuah bentuk dari tindakan untuk melakukan penyingkiran dan juga melakukan pengucilan ke dalam sebuah bentuk dari pingiran masyarakat. Ekstensi sosial adalah fenomena di mana individu atau kelompok tertentu terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang seharusnya dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Pemisahan ini menyebabkan terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya dan peluang, yang bisa memperburuk kehidupan mereka. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab ekstensi sosial, mulai dari diskriminasi dan ketidaksetaraan, hingga kesenjangan yang ada dalam struktur sosial.

Salah satu kelompok yang paling rentan terhadap ekstensi sosial adalah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan yang mencerminkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sering kali menjadi penyebab utama marginalisasi sosial. Karena keterbatasan ini, keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dan fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Situasi ini menciptakan siklus ketidakberdayaan yang menghalangi mereka untuk keluar dari jurang kemiskinan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi yang lebih

luas. Eksklusi sosial yang dialami oleh keluarga miskin dapat terlihat dalam berbagai aspek. Dalam tataran sosial, mereka sering terisolasi dari jaringan dukungan emosional dan material. Secara ekonomi, akses mereka terhadap pekerjaan layak sangat terbatas, dan sering kali mereka kehilangan peluang kerja akibat kurangnya pendidikan atau pelatihan.

Selain itu, secara psikologis ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan terasing dari kehidupan sosial dapat mengakibatkan perasaan rendah diri, depresi, dan ketidakpuasan hidup yang mendalam. Keluarga yang terisolasi ini juga mengalami kesulitan dalam mengakses kebijakan atau program pemerintah yang dirancang untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Penelitian mengenai eksklusi sosial terhadap keluarga miskin sangat relevan, baik untuk memahami fenomena sosial ini maupun untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Fokus pada kelompok ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai dampak kemiskinan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka, serta mengeksplorasi cara agar kebijakan publik bisa lebih efektif dalam mengatasi eksklusi sosial.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Sejak lahir, manusia memang diciptakan untuk hidup bersama dan berhubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung membentuk kelompok, baik secara alami maupun karena kesamaan tujuan atau latar belakang. Kelompok-kelompok ini bisa berupa keluarga, suku, agama, organisasi,



bahkan negara. Pembentukan kelompok seperti ini bukan hal yang aneh, karena manusia merasa lebih aman dan nyaman saat berada di tengah-tengah orang lain. Melalui kelompok, seseorang bisa saling membantu, berbagi, dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kelompok juga memberikan identitas sosial bagi tiap individu, yang membuat mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.

Dengan kata lain, kehidupan sosial adalah bagian penting dari diri manusia. Hidup sendirian tanpa berinteraksi dengan orang lain akan membuat seseorang kesulitan berkembang, baik secara emosional maupun sosial. Itulah mengapa hubungan antarindividu dalam kelompok menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, manusia juga memiliki hakekat sosialitas (kebersamaan) berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat untuk waktu yang sama dengan saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kecenderungan itu dilakukan manusia untuk membentuk kelompok-kelompok yang mana anggotanya memiliki tujuan yang sama dimana kelompok tersebut bernama organisasi dan komunitas. Organisasi atau komunitas pada dasarnya adalah manifestasi konkrit dari sifat sosial individu. Di dalamnya, terdapat sekelompok individu yang memiliki visi yang serupa dan sepakat untuk bersinergi demi mencapai tujuan tersebut, seperti yang mereka harapkan sejak awal pembentukan komunitas atau organisasi itu.

Dalam kelompok semacam ini, umumnya perilaku setiap anggota tidak selamanya seragam. Terdapat perbedaan di antara mereka karena interaksi yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal dan bersosialisasi. Menurut Nirman yang diacu dalam tulisan Soelaeman, perilaku individu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah hidupnya (biografi), karakter pribadinya, sudut pandangannya terhadap hal-hal (persepsi), dan juga sikap yang ia tampilkan dalam aktivitas sehari-hari. Eksklusi sosial dianggap sebagai sebuah hal yang masih kerap dialami oleh para penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak-haknya, salah satunya dalam hal pendidikan.

Menurut Walker and Walker (1997) eksklusi sosial merupakan sebuah proses yang dinamis terkait pengucilan pada individu dari sistem sosial, ekonomi, politik, maupun budaya yang menentukan integritas individu di dalam masyarakat. Proses yang tersebut meliputi penolakan atas sumber daya, hak, maupun ketidakmampuan individu/kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Beberapa akses terkait ekonomi, sosial, budaya, maupun politik hanya dapat dimiliki oleh kelompok mayoritas. Selain itu, menurut Levitas et al (2007) eksklusi sosial dapat digambarkan melalui bentuk partisipasi sosial yang tidak memadai, kurang terintegrasi, dan kurangnya power di dalamnya. Hal ini dapat menjelaskan sejauh mana hak-hak ditolak dan menjadikan beberapa kelompok menjadi tereksklusi (Rinaldi, 2020).

Selain pengelompokan yang terlihat secara fisik, seperti suku atau organisasi, dalam masyarakat juga terdapat bentuk pengelompokan yang tidak tampak dengan jelas. Pengelompokan ini umumnya didasarkan pada posisi, status, dan norma sosial yang berlaku. Dalam komunitas, setiap individu memiliki posisi atau tingkatan yang berbeda dengan yang berada di tingkat atas, ada juga yang di tingkat bawah. Klasifikasi semacam ini disebut dengan istilah stratifikasi sosial.

Stratifikasi sosial ini dapat memengaruhi interaksi antarindividu, dan bahkan dapat menyebabkan kesenjangan atau ketimpangan. Apabila seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki kesempatan atau akses yang setara akibat posisi sosial mereka, kondisi ini dapat mengakibatkan eksklusif sosial, yaitu situasi di mana individu terpinggirkan atau tidak berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Eksklusif sosial seperti terjadi di sekolah subjek, menurut de Leeuw et al. (2018), bisa menimbulkan efek berantai. Mereka mengkonfirmasi melalui puluhan eksperimennya, bahwa anak yang terkesklusi dari lingkungan sosialnya justru menjadi lebih agresif bahkan kepada siswa lain yang tidak mengganggu dirinya, tidak bersedia membantu dan bekerjasama tim, berperilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, suka menunda-nunda, dan memiliki kemampuan penalaran yang buruk (Lestari et al., 2022).

Ada lima macam rumusan yang bagi oleh Vilfredo Pareto, Guitano Mosca, dan Robert Putnam agar menjadi dasar bagi terbentuknya stratifikasi

sosial khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan politik . Salah satu dari rumusan tersebut ialah bahwa di dalam struktur sosial secara sederhana dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu kelompok yang memilikimasyarakat atau kelompok dan juga dapat memiliki hubungan sosial yang sangat luas karena status sosial yang membuatnya dapat menjalin komunikasi Dalam masyarakat, kekuasaan dan otoritas sering kali hanya dikuasai oleh kelompok tertentu yang dianggap berpengaruh. Di sisi lain, terdapat kelompok lain yang tidak memiliki kekuasaan itu, sehingga sering kali terisolasi.

Selain stratifikasi sosial, terdapat juga yang dikenal sebagai kelas sosial. Kelas sosial merupakan aspek yang lebih terbatas dari stratifikasi sosial dan juga dapat mengakibatkan eksklusi sosial dalam suatu komunitas. Kelas sosial merujuk pada kelompok individu yang memiliki kesamaan dalam pandangan politik, nilai budaya, sikap, serta cara berinteraksi sosial. Kelas sosial dapat dilihat dari status sosial individu, sikap, dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, kemampuan juga berperan sebagai penentu status sosial, seperti kemampuan finansial, keterampilan, atau keahlian tertentu. Sebagai contoh, individu dengan pendapatan tinggi cenderung tergolong dalam kelas sosial yang lebih atas dan umumnya juga dihargai dalam komunitasnya.

Individu yang berada dalam kelas sosial atas lebih gampang terlibat dalam aktivitas sosial dan membangun hubungan dengan orang lain dari



kelas yang sepadan, meskipun mereka juga dapat berinteraksi dengan individu dari kelas sosial yang lebih rendah. Jenis-jenis stratifikasi sosial dapat dibedakan berdasarkan cara seseorang mendapatkannya, apakah melalui keturunan, usaha individu, atau posisi yang dipegang dalam masyarakat menjadi tiga yaitu Ascribed status yang diperoleh secara alamiah (perbedaan usia, jenis kelamin, sistem kekerabatan, kelahiran, dan berdasarkan kelompok tertentu), Achieved status yang diperoleh melalui perjuangan seseorang (jenjang pendidikan, senioritas, pekerjaan, dan ekonomi), Assigned Status yang Seseorang bisa mendapatkan status sosial bukan hanya karena diberi, tapi juga karena usaha yang ia lakukan sendiri. Dari situ, ia bisa mendapatkan penghargaan atau pengakuan. Namun, dalam kelompok sosial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sering kali terjadi eksklusi sosial, terutama karena adanya kelas sosial, yang merupakan bagian kecil dari stratifikasi sosial.

Stratifikasi sosial ini sering menjadi penyebab utama terjadinya eksklusi sosial, sedangkan diskriminasi merupakan akibat dari eksklusi tersebut. Artinya, ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan hak atau perlakuan yang sama, maka hal itu bisa berujung pada perlakuan diskriminatif.

Menurut Byrne, seperti yang dikutip oleh Setyawati dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya (Edisi Khusus, 2010: 133), eksklusi sosial adalah sebuah proses yang terjadi dalam banyak aspek kehidupan. Misalnya,

seseorang bisa terpinggirkan dalam hal ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan akses terhadap sumber daya, atau bahkan tidak dianggap dalam budaya yang berlaku. Definisi ini menekankan bahwa ketimpangan dalam hal ekonomi dan kekuasaan merupakan faktor penting dalam terjadinya eksklusi sosial.

Eksklusi sosial biasanya dilihat dari sisi negatif. Orang atau kelompok yang tereksklusi sering kali dianggap tidak penting karena mereka memiliki pendapatan rendah, status sosial yang rendah, dan kurang dihargai dalam masyarakat. Akibatnya, mereka sering tidak diajak berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau keputusan kelompok pengembangan masyarakat dan studi sosial, karena berkaitan dengan perancangan sosial, analisis kebijakan sosial dan praktik pembangunan sosial di banyak negara maju. Konsep eksklusi sosial ini muncul di Copenhagen pada tahun 1995. Eksklusi sosial memperluas analisis kemiskinan dengan memberi tumpuan kepada analisis sebab dan dampak sosial (Nurdin, 2015).

Faktor utama yang menyebabkan eksklusi sosial dalam akses pendidikan mencakup ketidaksetaraan ekonomi, segregasi sosial, diskriminasi, serta kurangnya aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Ketidakmampuan finansial sering kali menjadi faktor utama yang menghalangi individu atau keluarga dari kelompok ekonomi rendah untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Di samping itu, faktor-faktor sosial seperti ketidaksetaraan gender,

ketidakadilan etnis, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga turut berkontribusi pada eksklusi sosial dalam pendidikan. Selain itu, struktur dan kebijakan pendidikan yang tidak inklusif dan berpihak kepada kelompokkelompok tertentu juga dapat memperkuat fenomena eksklusi sosial tersebut.

Eksklusi sosial menurut Sen (2000:15) diartikan dengan dua kategorikan, yaitu Eksklusi Aktif dan Eksklusi Pasif. Eksklusi aktif adalah adanya kebijakan atau tindakan baik dari pemerintah maupun agen lainnya yang dengan sengaja mengeksklusi sekelompok orang dari sebuah kesempatan. Sedangkan Eksklusi pasif yaitu terputusnya akses dari sebuah kesempatan tanpa disengaja, misalnya Undang-Undang peternakan, yang dapat membatasi sebagian peternak dalam mendapatkan sumber daya atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai peternak. Konsep eksklusi sosial digunakan karena kaitan luas meliputi aspek sosial, ekonomi dan politik, dengan fokus utama devripasi atau pencabutan hak (Sulaeman et al., 2019).

Dampak dari eksklusi sosial dalam akses pendidikan sangatlah luas dan berdampak jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Individu yang terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas cenderung memiliki peluang yang terbatas dalam hal pekerjaan, penghasilan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Maulana, 2023). Sehingga terjadilah pengasingan bahkan tidak dilibatkan dalam apapun yang menimbulkan

eksklusi sosial. Dari instansi setempat kantor desa misalkan. Pemberian sembako yang tidak merata antara yang benar-benar membutuhkan dengan yang tidak membutuhkan, karena adanya hubungan keluarga dan sebagainya (pengucilan antara individu dan kelompok).

Dalam sebuah komunitas, pengucilan sosial sering kali terjadi akibat adanya pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu stratifikasi sosial. Pengucilan ini timbul karena adanya perlakuan yang berbeda antara individu yang memiliki posisi lebih tinggi dan mereka yang berada di posisi lebih rendah.

Seringkali, individu atau kelompok yang melakukan pengucilan adalah mereka yang berada di kelas atas dan memiliki status sosial yang lebih tinggi. Di sisi lain, mereka yang diasingkan atau dikucilkan biasanya berasal dari kelas sosial yang lebih rendah, yang seringkali dianggap tidak memiliki kekuatan atau pengaruh dalam komunitas itu. (Ui, 2023).

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi pada kelompok majelis taklim yang mana kelompok pengajian ini merupakan kelompok yang bersifat informal yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana individu atau sekelompok individual yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain didalam suatu masyarakat yang sama (Ui, 2023).

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi



untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Ramdass, 2010). Mereka mungkin menghadapi diskriminasi, stigma, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

1. Pengalaman Langsung: Anggota keluarga miskin memiliki pengalaman langsung dan mendalam tentang berbagai bentuk eksklusi yang mereka hadapi sehari-hari. Ini memberikan data kualitatif

yang kaya dan berharga untuk penelitian.

2. Dampak Generasi: Eksklusi sosial yang dialami oleh satu generasi dapat berdampak pada generasi berikutnya, menciptakan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan. Mempelajari pengalaman keluarga miskin dapat membantu memahami dinamika ini.
3. Pemahaman yang Lebih Mendalam: Mengambil sampel dari kelompok miskin memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam mekanisme dan dampak eksklusi sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari.
4. Identifikasi Faktor Penyebab: Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap eksklusi sosial, seperti kebijakan pemerintah, diskriminasi, dan ketidaksetaraan struktural.
5. Pengembangan Intervensi: Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan program dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi eksklusi sosial dan mengurangi kemiskinan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai dimensi eksklusi sosial yang dialami oleh keluarga miskin, serta dampaknya terhadap kehidupan mereka. Dampak ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, karena eksklusi sosial dapat mempengaruhi dinamika masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam

merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, yang menjamin akses setara bagi keluarga miskin terhadap berbagai kesempatan dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kesimpulannya, studi tentang eksklusi sosial terhadap keluarga miskin sangat krusial dalam mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan intervensi yang dapat mengurangi marginalisasi sosial di masyarakat.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab sehingga terjadinya eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai eksklusi sosial terhadap anggota keluarga yang mengalami kemiskinan memiliki manfaat teoritis yang signifikan. Dengan memperkaya pemahaman tentang kemiskinan dalam konteks tersebut, penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial, budaya, dan politik. Eksklusi sosial memperburuk kondisi kemiskinan dengan membatasi akses terhadap sumber daya dan peluang. Dimana dalam penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana eksklusi sosial berkontribusi pada siklus kemiskinan antar generasi, memperkaya pemahaman tentang konsep eksklusi sosial dan kemiskinan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusi sosial.

## 2. Manfaat Praktis

### a.) Bagi Penulis

Dapat diberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan beberapa ide penulis kedalam tulisan tersebut sehingga penulis dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Dan penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman, membantu pengembangan kebijakan anti-kemiskinan efektif dan mengurangi stigma keluarga terhadap keluarga prasejahtera.

### b.) Bagi masyarakat

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi pemerintahan

desa setempat dalam upaya membangun masyarakat yang harmoni serta meminimalisir terjadinya praktek eksklusi sosial dalam masyarakat desa (Ummah, 2019).

#### **E. Definisi Operasional**

1. Eksklusi sosial: kondisi dimana individu atau kelompok tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik karena faktor-faktor seperti kemiskinan, diskriminasi, atau keterisolasi, tidak memiliki akses pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan dan perumahan, tidak memiliki kesempatan kerja atau pendapatan yang stabil, dan tidak memiliki jaringan sosial yang baik.
2. Kemiskinan: kondisi dimana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendapatan dibawah garis kemiskinan, tidak memiliki akses sumber daya alam (air, tanah, dan energi).
3. Anggota Keluarga: Individu yang hidup bersama dalam satu rumah tangga.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Konsep**

Kajian pustaka merupakan serangkaian ulasan sistematis terhadap literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian yang tengah diteliti. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk memberikan landasan teori, mendalami isu-isu yang telah diteliti sebelumnya, dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dalam suatu bidang ilmu. Dengan demikian, kajian pustaka lebih dari sekadar rangkuman penelitian terdahulu; ia juga merupakan upaya untuk menginterpretasi, mengkritisi, dan menyintesis informasi yang ada guna mendukung pemikiran dan kerangka konseptual penelitian yang sedang dilakukan.

##### **1. Eksklusi Sosial**

Menurut John Pierson (2002), pengucilan sosial merupakan suatu proses yang menyebabkan individu, keluarga, atau kelompok kehilangan hak untuk mengakses sumber daya yang krusial. Hal ini mengakibatkan mereka tidak mampu berpartisipasi secara maksimal dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik di komunitas. Proses ini sering kali dipicu oleh kemiskinan dan pendapatan yang rendah, namun terdapat juga faktor-faktor lain yang berkontribusi. Contohnya, diskriminasi, pendidikan yang rendah, serta kondisi lingkungan yang tidak baik juga bisa menjadi alasan mengapa seseorang atau kelompok



mengalami pengucilan sosial.

Barry (2006) mempertegas pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa eksklusi sosial berkaitan dengan dua kondisi, kemiskinan dan ketidakmerataan. Bentuk-bentuk ketidakmerataan secara lahir dapat berupa etnis, agama, ras, orientasi seksual, kasta, gender, usia, kecacatan, HIV, status migrasi atau tempat tinggal. Barry dalam Haralambos, Holborn, dan Heald (2004) juga menegaskan bahwa eksklusi sosial tidak hanya disebabkan karena pilihan dan lingkungan dimana individu itu berada, lebih dari itu disebabkan karena kebijakan nasional dan pelayanan di tingkat lokal.

Sementara itu, Room (1995) dalam salah satu studi awal mengenai pengucilan sosial menjelaskan bahwa pengucilan sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara individu atau kelompok dengan masyarakat secara keseluruhan. Ia menyebutkan lima faktor utama yang menjadi dasar pemahaman tentang pengucilan sosial. Dua di antaranya adalah:

a) Multidimensi

Pengucilan sosial tidak dapat hanya diukur dari rendahnya pendapatan individu. Kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, seperti kualitas hidup, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam masyarakat.

b) Dinamis

Dalam memahami pengucilan sosial, kita harus

melihatnya sebagai suatu proses. Ini berarti kita perlu melacak bagaimana pengucilan tersebut terjadi dan apa saja penyebabnya.

c) Kolektif

Eksklusi sosial bukan hanya mengenai standar hidup individu, tetapi juga mengenai sumber daya kolektif di lingkungan atau komunitas. Hal ini diartikan sebagai fasilitas publik yang tidak memadai atau tidak memuaskan, seperti sekolah rusak, toko- toko letaknya jauh, jaringan transportasi umum yang buruk dan sebagainya.

d) Relasional

Pengertian tentang kemiskinan terutama difokuskan pada masalah distribusi, kurangnya sumber daya yang dapat digunakan oleh individu atau rumah tangga. Sebaliknya, eksklusi sosial lebih bergokus pada masalah relasional. Dengan kata lain, hal ini mengacu pada minimnya partisipasi, kurangnya integrasi sosial dan kekuasaan. Atkinson (1998) juga menyebutkan bahwa konsep eksklusi sosial memiliki tiga elemen utama

Relativitas, yang berarti pengucilan atau marginalisasi seseorang terjadi dalam konteks komunitas tertentu, pada waktu dan tempat tertentu. Agensi, yang menunjukkan bahwa pengucilan dapat disebabkan oleh tindakan individu lain atau

pihak-pihak tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung membuat seseorang terpinggirkan.

Dinamika, yang berarti pengucilan tidak hanya disebabkan oleh keadaan saat ini, tetapi juga bisa dipicu oleh pandangan tentang masa depan seseorang yang dianggap tidak menjanjikan. Papadopoulus (2002) menyatakan bahwa terdapat konsensus seputar lima atribut utama dari konsep eksklusi sosial. Pertama, multidimensi yang melintasi berbagai indikator standar hidup termasuk lingkungan atau sumber daya masyarakat. Kedua, dinamis dimana hubungan tidak hanya dengan situasi saat ini tetapi juga dengan prospek di masa depan. Ketiga, relatif hal ini menyiratkan pengucilan dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Keempat, hak pilihan yang berada diluar tanggung jawab sempit individu. Kelima, relasional artinya diskontinuitas besar dengan seluruh masyarakat (A, 2011).

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan dengan berbagai cara, dan sejumlah pakar telah berusaha untuk menguraikannya. Hingga saat ini, kemiskinan tetap menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Secara umum, setiap negara termasuk Indonesia memiliki metode tersendiri dalam menentukan apakah individu atau sekelompok orang termasuk dalam kategori miskin. Ini

disebabkan oleh sifat kemiskinan yang relatif, yang bergantung pada keadaan masing-masing negara, termasuk aspek ekonomi, standar kesejahteraan, dan situasi sosial masyarakat setempat.

Definisi kemiskinan biasanya ditetapkan dengan menggunakan kriteria tertentu, seperti pendapatan rata-rata, kemampuan beli atau tingkat konsumsi, tingkat pendidikan, dan kesehatan (Jacobus, dkk, 2021).

Sementara itu, Supriatna (1997:90) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi kekurangan yang dialami seseorang bukan berdasarkan kemauannya, melainkan akibat situasi yang membatasi kehidupannya. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

Menurut Bappenas (2004), Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau kelompok, baik pria maupun wanita, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar dapat hidup dengan baik dan terhormat. Mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan hal-hal esensial seperti makanan, hunian, pendidikan, dan akses kepada layanan kesehatan, yang seharusnya merupakan hak setiap orang.

Pemahaman teoretis tentang hubungan patron-klien telah

berubah dari waktu ke waktu. Beberapa peneliti menemukan beberapa temuan berdasarkan tradisi sosiologis dan antropologis, peneliti menyoroti tiga fitur utama dari fenomena tersebut: komunikasi pribadi; pertukaran langsung sumber daya dan tingkat loyalitas dan ketidaksetaraan antara patron dan klien (Oruh et al., 2022).

Rozali Ritonga (dalam Elfindri, 2019) menyatakan bahwa penurunan ko angka kemiskinan tidak seharusnya selalu dianggap sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena, penurunan tingkat kemiskinan secara keseluruhan (agregat) tidak selalu disertai dengan peningkatan kemampuan dasar (kapabilitas) masyarakat miskin, yang dikenal dengan istilah capability poverty. Artinya, meskipun seseorang mengalami peningkatan penghasilan, kenaikan pendapatan tersebut tidak selalu diiringi dengan perbaikan dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, mungkin sebuah keluarga yang kurang mampu telah keluar dari garis kemiskinan secara finansial, namun mereka tetap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai

## 2. Kemiskinan

Berdasarkan Chambers (1983:98), terdapat lima karakteristik utama yang mencerminkan keadaan tidak menguntungkan yang dialami oleh individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

a) Kemiskinan (Kekurangan ekonomi)

Orang yang kurang mampu umumnya tinggal di hunian yang sudah usang dan terbuat dari material yang tidak kokoh atau berkualitas rendah. Peralatan rumah tangganya sangat terbatas, tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) pribadi.

b) Kelemahan fisik

Ini dapat muncul disebabkan oleh tidak adanya pria dewasa yang sehat sebagai pemimpin keluarga. Dalam terminologi Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial (PMKS), ini disebut perempuan rentan sosial ekonomi, yaitu perempuan yang diharuskan menjadi kepala keluarga sekaligus penghasil nafkah. Selain itu, makanan yang kurang bergizi juga menjadikan mereka lebih rentan terhadap penyakit.

c) Keterasingan (Kesendirian)

Keluarga yang kurang mampu sering kali tinggal di lokasi terpencil dan sulit diakses. Karena tempat yang terpencil ini, mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi dan akses ke layanan penting.

d) Kerentanan

Keluarga yang kurang mampu sangat berisiko untuk semakin terpuruk jika menghadapi bencana, seperti bencana alam, kehilangan pencari nafkah, atau situasi tak terduga lainnya.



Dalam kondisi demikian, mereka kerap kali terpaksa menjual harta yang dimiliki untuk dapat bertahan hidup.

e) Ketidakmampuan (Inability)

Orang-orang yang kurang beruntung sering kali merasa tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengubah situasi hidup mereka. Mereka tampak terperangkap dalam situasi yang sulit untuk lepas dari kemiskinan.

Soemardjan (dalam Sumodiningrat, 1999, 81), menjelaskan 2 cara pengukuran kemiskinan, *pertama*, indikator kemiskinan absolut adalah kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. *Kedua*, indikator kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah (A, 2011).

Pandangan lain Sumodiningrat (1999) klasifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan structural, kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara. Kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan.

Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan

pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan. Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak.

Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (daerah-daerah yang kritis akan sumberdaya alam dan daerah terpencil), rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.

Sedangkan Kemiskinan sementara terjadi akibat adanya: Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman, dan bencana alam atau

dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Annur, 2013).

3. Faktor penyebab eksklusi sosial terhadap anggota keluarga miskin

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal (Annur, 2013).

Berikut adalah beberapa tanggapan yang mungkin muncul terkait penerapan eksklusi sosial terhadap keluarga miskin:

1) Tanggapan Negative:

- a. Peningkatan ketidakadilan sosial: banyak anggota keluarga masyarakat yang mungkin merasa bahwa eksklusi sosial adalah memperburuk ketidakadilan yang ada. Mereka mungkin beranggapan bahwa

keluarga miskin itu dapat mengalami kesulitan dalam pemenuha kebutuhan sehari-hari.

- b. Penciptaan Stigma: Eksklusi sosial dapat memperburuk stigma terhadap keluarga miskin, memperburuk stereotip negatif dan meningkatkan perasaan rendah diri serta ketergantungan. Ini bisa memperburuk hubungan sosial dalam komunitas.
- c. Penghambat mobilitas sosial: Pendukung mobilitas sosial mungkin melihat eksklusi sosial sebagai hambatan terhadap upaya keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan. Seperti adanya akses yang cukup menghambat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan dapat mempersulit mereka untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.
- d. Penyebaran polarisasi: yang artinya dapat meningkatkan kecanggungan berkomunikasi antara kelompok kaya dan miskin, memperburuk perpecahan sosial yang sudah ada. Masyarakat dapat menjadi lebih terpolarisasi, dengan adanya ketidakpercayaan antar kelas sosial, baik dari kelas bawah, menengah dan kelas atas.

## 2) Tanggapan Positive:

a. Kontrol terhadap penggunaan sumber daya:

Beberapa orang mungkin mendukung penerapan eksklusi sosial

jika mereka percaya bahwa itu dapat membantu mengendalikan pemborosan sumber daya sosial dan mengalokasikan bantuan lebih efisien kepada mereka yang dianggap lebih "berhak" atau yang menunjukkan usaha lebih untuk mengubah nasib mereka.

b. Motivasi untuk perubahan sosial: seseorang beranggapan bahwa eksklusi sosial dapat mendorong keluarga miskin untuk bekerja lebih keras dan berusaha keluar dari lingkaran kemiskinan, meskipun ini bisa diperdebatkan karena sering kali kemiskinan terkait dengan banyak faktor yang tidak dapat diatasi hanya dengan motivasi individu.

c. Meningkatkan keamanan sosial: dalam suatu daerah

ada beberapa wilayah seseorang yang mendukung kebijakan ini mungkin merasa bahwa eksklusi sosial bisa mengurangi angka kejahatan atau penyalahgunaan sistem kesejahteraan sosial,

terutama jika mereka merasa bahwa keluarga miskin tidak berpartisipasi secara produktif dalam perekonomian atau kehidupan sosial.

- 3) Dampak sosial yang terjadi: Jika kebijakan eksklusi sosial diterapkan secara luas, hal ini dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Masyarakat yang sudah kaya atau memiliki kekuasaan bisa semakin terpisah dari yang miskin yang menjadi pembeda antar golongan. Sehingga menciptakan jurang pemisah yang lebih besar dalam akses terhadap kesempatan. Yang mana, sebagian masyarakat mungkin merasa terdorong untuk mengembangkan bentuk solidaritas baru untuk mendukung keluarga miskin yang terpinggirkan. Ini bisa menghasilkan gerakan sosial yang lebih besar, tetapi juga bisa menumbuhkan perasaan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara atau sistem yang dianggap tidak adil.

## **B. Kajian Teori**

Kajian teori merupakan elemen penting yang perlu disertakan dalam penulisan karya ilmiah, baik sebelum maupun setelah melakukan penelitian. Kajian teori umumnya berisi rangkaian definisi, konsep, dan perspektif yang terstruktur dengan baik mengenai suatu subjek tertentu.

### **1. Teori Inklusi dan Eksklusi Sosial**

Teori ini secara khusus membahas tentang proses dimana



individu atau kelompok dimasukkan atau dikeluarkan dari partisipasi penuh dalam masyarakat. Eksklusi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti diskriminasi, isolasi sosial, dan pengucilan. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “inklusi” dan “eksklusi”, konsep-konsep Marx tentang kelas sosial, eksploitasi dan alienasi sangat relevan dengan pemahaman kita tentang eksklusi sosial. Ia melihat bagaimana struktur sosial yang tidak setara dapat menyebabkan kelompok tertentu terpinggirkan dan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Implementasi pemikiran Ralf Dahrendorf dimana dalam karyanya seperti para fungsionalis, teori-teori konflik diorientasikan ke arah studi mengenai struktur-struktur dan lembaga-lembaga sosial. Pada umumnya, teori tersebut sedikit lebih dari sekadar serangkaian pendirian teoretis yang kerap bertentangan secara langsung dengan pendirian-pendirian fungsionalis. Antitesis itu dicontohkan paling baik oleh karya Ralf Dahrendorf (1958, 1959, lihat juga Strasser dan Nollman, 2005), saat ajaran-ajaran teori konflik dan fungsional dijabarkan.

Bagi kaum fungsionalis, masyarakat statis atau, paling jauh, dalam keseimbangan yang bergerak, tetapi bagi Dahrendorf dan para teoretisi konflik, setiap masyarakat pada setiap titik tunduk kepada proses-proses perubahan. Di mana kaum fungsionalis menekankan ketertiban masyarakat, para teoretisi konflik melihat pertikaian dan konflik ada

pada setiap titik di dalam sistem sosial.

Kaum fungsionalis cenderung melihat masyarakat diikat bersama secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai, dan moralitas bersama. Para teoretisi konflik melihat setiap ketertiban yang ada di dalam masyarakat berasal dari pemaksaan sejumlah anggota masyarakat oleh orang-orang yang berada di puncak. Sementara kaum fungsionalis berfokus pada kohesi yang diciptakan oleh nilai-nilai bersama masyarakat, para teoretisi konflik menekankan peran kekuasaan dalam memelihara tatanan di dalam masyarakat.

Dahrendorf (1959, 1968) adalah pendukung utama pendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan oleh karena itu teori sosiologis harus dipecah ke dalam dua bagian, teori konflik dan teori konsensus. Para teoretisi konsensus harus mengkaji nilai integrasi di dalam masyarakat, dan teoretisi konflik harus mengkaji konflik-konflik kepentingan dan paksaan yang menjaga kesatuan masyarakat di dalam menghadapi tekanan-tekanan itu.

Dahrendorf menyadari bahwa masyarakat tidak bisa ada tanpa konflik dan konsensus, keduanya merupakan prasyarat satu sama lain. Oleh karena itu, tidak akan ada konflik jika tidak ada konsensus yang mendahuluinya. Contohnya, para ibu rumah tangga Prancis sangat tidak menyukai konflik dengan para pemain catur orang Chile karena di antara mereka tidak ada kontak, tidak ada integrasi sebelumnya yang

berfungsi sebagai dasar bagi suatu konflik. Sebaliknya, konflik dapat menyebabkan konsensus dan integrasi. Contohnya, aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang yang berkembang setelah Perang Dunia II.

Meskipun ada antarahubungan antara konsensus dan konflik, Dahrendorf tidak optimis akan kemungkinan untuk mengembangkan suatu teori sosiologis tunggal yang mencakup kedua proses itu:

"Tampaknya setidaknya dapat dibayangkan bahwa penyatuan teori tidak mungkin hingga titik yang telah membingungkan para pemikir sejak permulaan filsafat Barat" (1959: 164). Menjauhkan diri dari teori tunggal, Dahrendorf mulai membangun suatu teori konflik masyarakat.

Dahrendorf mulai dengan dan sangat dipengaruhi oleh, fungsionalisme struktural. Dia mencatat bahwa bagi sang fungsionalis, sistem sosial diper-satukan oleh kerja sama sukarela atau konsensus umum atau keduanya. Akan tetapi, bagi teoretisi konflik (atau paksaan), masyarakat dipersatukan oleh "pembatasan yang dipaksakan"; dengan demikian, beberapa posisi di masyarakat merupakan kekuasaan dan otoritas yang didelegasikan kepada orang lain. Fakta kehidupan sosial tersebut membawa Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa distribusi otoritas yang diferensial "selalu menjadi faktor penentu konflik-konflik sosial sistematis" (1959:165).

Ringkasnya, Dahrendorf berargumen bahwa sekali kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat di dalam tindakan-tindakan

yang menyebabkan perubahan-perubahan di dalam struktur sosial. Ketika konflik membara, perubahan yang terjadi adalah radikal. Ketika konflik disertai oleh kekerasan, akan terjadi perubahan struktural yang mendadak. Misalkan adanya relasi kekeluargaan yang menjabarkan antara tim dan bukan tim, sistem kekerabatan antara kelas atas dan bawah. Walaupun tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah tetapi ia tetap tunduk dan patuh akan hal itu.

## 2. Teori Tindakan Rasional

Tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Tindakan dan Tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda, Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jika tindakan tersebut tidak diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan sosial tetapi hanya disebut sebuah “tindakan” saja, sehingga tindakan sosial akan memberikan pengaruh bagi orang lain, karena tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan dan pemahaman (Weber, n.d.).

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki artiarti subjektif tersebut kedalam empat tipe atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan tindakan sosial manusia

ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami (Ii & Teori, 1920):

a) Tindakan Rasionalitas Instrumental (Zwerk Rational)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya: Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang kesekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.

b) Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational)

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat- alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuantujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh: perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu

karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

c) Tindakan Afektif(Affectual Action)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara.

d) Tindakan Tradisional (Traditional Action)

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya menggunakan tanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar. Karena itu tidak termasuk kedalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian sosiologi.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan pemikiran yang melibatkan penyatuan teori, fakta, pengamatan, dan studi pustaka dalam rangka mendukung penulisan karya tulis ilmiah. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai dasar yang digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dari



penelitian.

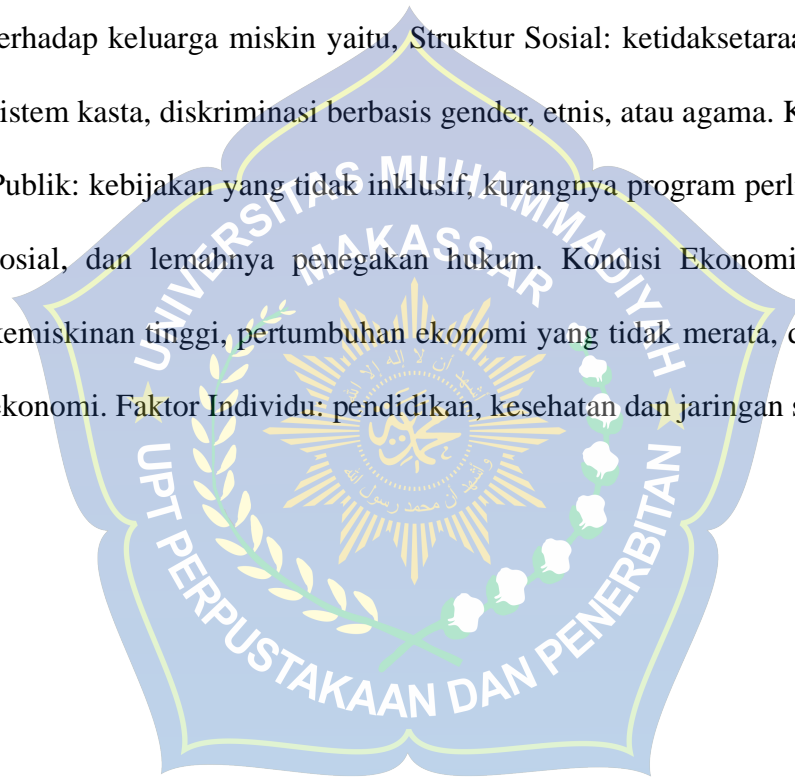
Eksklusi sosial adalah sebuah fenomena keompleks yang melibatkan berbagai dimensi termasuk ekonomi, sosial, politik dan budaya. Ketika diterapkan pada konsep keluarga miskin, eksklusi sosial dapat diartikan sebagai prose pengucilan atau peminggiran yang dialami oleh anggota keluarga miskin dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

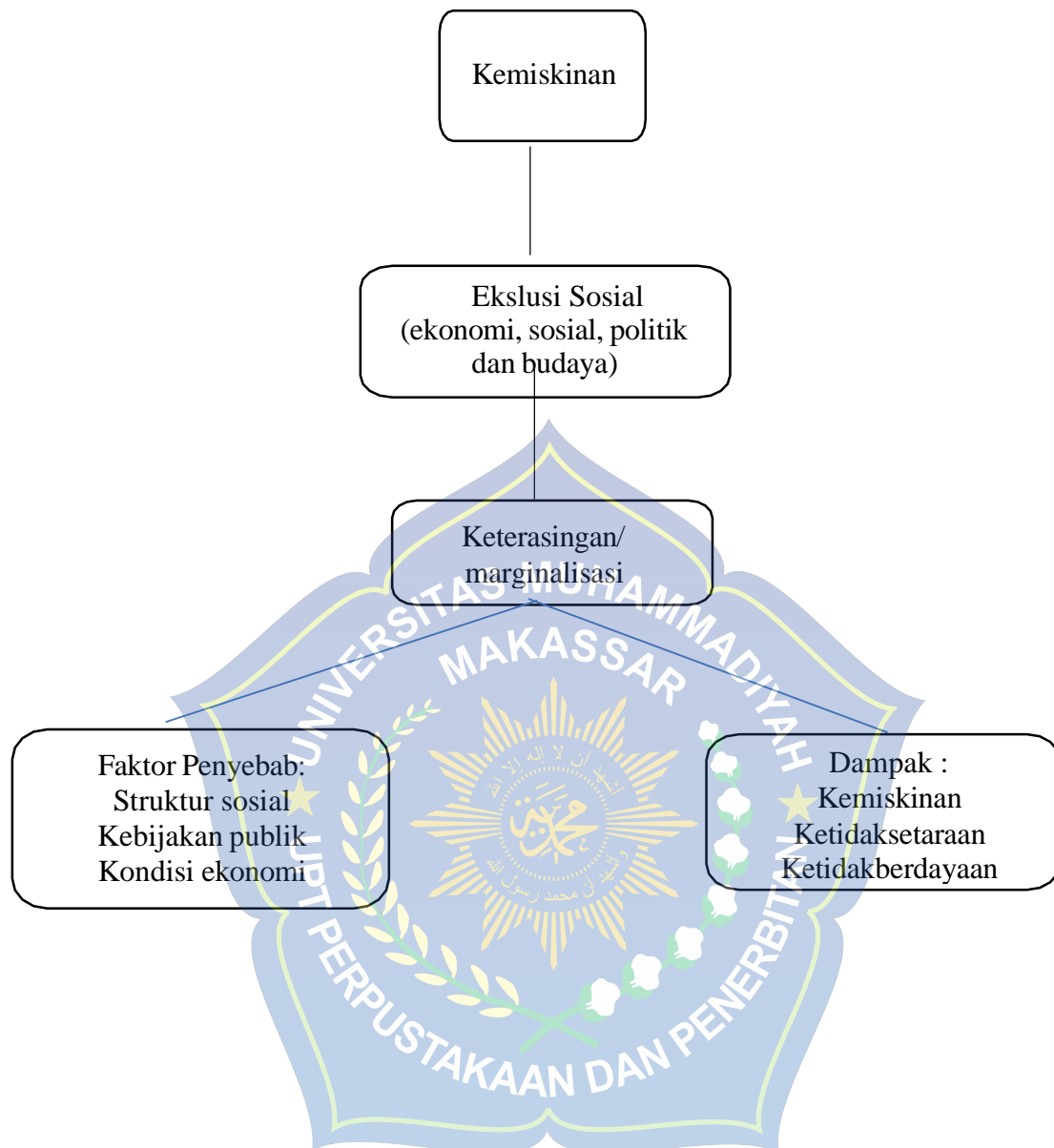
Dimensi esklusi sosial pada keluarga miskin yaitu Ekonomi: akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi mengenai pekerjaan dan pendapatan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sandang pangan dan tempat tinggal, keterbatasan akses layanan publik seperti puskesmas dan sekolah. Sosial: stigma dan diskriminasi sosial, isolasi sosial dan kurangnya jaringan sosial, keterbatasan dan partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Politik: kurangnya artispasi dalam pengambilan keputusan publik, keterbatasan akses terhadap informasi dan pengetahuan, kesulitan dan mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Budaya: internalisasi kemiskinan sebagai nasib yang tak terhindarkan, kurangnya harga dan percaya diri, adanya norma dan nilai yang memperkuat ketidaksetaraan.

Masalah kemiskinan selalu menjadi sorotan di negri ini. dalam hal ini pemerintah mengemukakan jika dengan memecahkan maslaah kemiskinan maka akan berdampak kehidupan sosial, ekonomi, sosial,

politik bagi masyarakat. Terkait fenomena kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan sosial dalam masyarakat di dalamnya mengkaji mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan, mulai dari karena pernikahan dini hingga faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah karena adanya sikap keagamaan (Agustina et al., 2022).

Sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi eksklusi soal terhadap keluarga miskin yaitu, Struktur Sosial: ketidaksetaraan sosial, sistem kasta, diskriminasi berbasis gender, etnis, atau agama. Kebijakan Publik: kebijakan yang tidak inklusif, kurangnya program perlindungan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi Ekonomi: tingkat kemiskinan tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dan krisis ekonomi. Faktor Individu: pendidikan, kesehatan dan jaringan sosial.



**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami keluarga prasejahtera di Desa Padang menjadi titik awal terjadinya eksklusi sosial. Keterbatasan pendapatan dan pekerjaan membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menjalar pada aspek sosial, politik, dan budaya.

Eksklusi sosial yang dialami keluarga prasejahtera tampak dalam berbagai bentuk. Pada dimensi ekonomi, mereka terbatas dalam memperoleh pekerjaan layak dan upah yang memadai serta kesulitan mengakses layanan publik seperti puskesmas dan sekolah. Pada dimensi sosial, mereka sering mengalami pengucilan, stigma sebagai “orang miskin”, serta lemahnya jaringan sosial. Pada dimensi politik, keluarga miskin kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, sehingga suara mereka jarang terdengar. Sementara itu, pada dimensi budaya, mereka menghadapi rendahnya harga diri dan rasa percaya diri, bahkan muncul pandangan bahwa kemiskinan adalah nasib yang tidak dapat dihindari.

Situasi tersebut semakin memperkuat marginalisasi dan keterasingan yang mereka alami. Keluarga prasejahtera tidak hanya terpinggirkan dari akses layanan dasar, tetapi juga kehilangan daya tawar untuk memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan sosial. Hasil

penelitian menemukan bahwa faktor penyebab utama eksklusi sosial meliputi ketidaksetaraan dalam struktur sosial, lemahnya kebijakan publik yang kurang inklusif, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, serta rendahnya pendidikan dan keterampilan individu.

Dampak dari eksklusi sosial ini sangat luas. Keluarga prasejahtera terjebak dalam siklus kemiskinan yang berulang dari generasi ke generasi, karena hambatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Mereka juga mengalami ketidakberdayaan dalam kehidupan politik dan sosial, serta semakin memperlebar ketidaksetaraan antara kelompok miskin dengan kelompok yang lebih mampu. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa eksklusi sosial merupakan proses multidimensi yang memperkuat kemiskinan sekaligus menciptakan jurang ketidakadilan yang semakin dalam di masyarakat.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan usaha para peneliti dalam mencari perbandingan dan menginspirasi penelitian-penelitian berikutnya. Selain itu, tinjauan literatur sebelumnya membantu dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan keorisinalan dari penelitian tersebut.

Penelitian ini dilakukan oleh Desi Yunita(2018) Universitas Padjajaran dengan judul “Eksklusi Sosial Pada Masyarakat Petani” yang berlokasi di Jawa Barat. pada penelitian ini peneliti menemukan

sebuah pembahasan mengenai perubahan-perubahan yang menjadi pendorong terjadinya eksklusi sosial pada masyarakat petani, dan memperlihatkan bentuk-bentuk eksklusi sosial apa saja yang terjadi pada masyarakat petani (Yunita, 2018). Penelitian ini peneliti menemukan adanya perbedaan pada penelitiannya yaitu, Eksklusi Sosial Pada Anggota Keluarga Yang Mengalami Kemiskinan.

Penelitian ini dilakukan oleh Desi Primaya Yustitia Nurul Islami(2020) Universitas Negeri Jakarta dengan judul “Eksklusi Sosial Atas Masalah Pendidikan Bagi Keluarga Miskin” yang berlokasi di Kampung Lio, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. pada penelitian ini peneliti menemukan sebuah pembahasan yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah tidak menyukai sekolah karena merasa dikucilkan oleh teman-teman sehingga membuat mereka tidak nyaman berada di lingkungan sekolah serta faktor sekolah (Bagi & Miskin, 2020). Penelitian ini peneliti menemukan adanya perbedaan pada penelitiannya yaitu, Eksklusi Sosial Pada Anggota Keluarga Yang Mengalami Kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gibran Maulana (2020) Universitas Medan Area, Indonesia dengan judul “Eksklusi Sosial Dalam Akses Terhadap Pendidikan: Tinjauan Dari Perspektif Keadilan” perbedaan lainya pada penelitian ini peneliti menemukan sebuah pembahasan mengenai tinjauan ini bertujuan untuk menganalisis

eksklusi sosial dalam konteks akses pendidikan dari perspektif keadilan. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan eksklusi sosial dalam akses pendidikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada disparitas ekonomi, ketidaksetaraan gender, diskriminasi etnis, dan ketidakmampuan fisik. Perspektif keadilan menyoroti pentingnya memperjuangkan kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau keuangan mereka. Dalam konteks ini, kebijakan publik dan praktik pendidikan yang inklusif menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Maulana, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Joharatu Halimah (2023) Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Eksklusi Sosial Pada Masyarakat Pesisir Sebagai Dampak Pembangunan Pariwisata Tanjung Lesung Pandeglang Banten" perbedaan lain pada penelitian ini peneliti menemukan sebuah pembahasan, dimana penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pembangunan pariwisata Tanjung Lesung yang berdampak pada eksklusi sosial masyarakat pesisir di kampung Bandar Pandeglang Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori eksklusi sosial dari Derek Hall, Hirs dan Tania Li (2011). Eksklusi sosial di kampung Bandar Pandeglang Banten ditemukan sejak pembangunan pariwisata Tanjung Lesung mulai tahun 1990 sampai



penelitian ini berlangsung. Ada dua ketidakadilan dalam eksklusi sosial pembangunan pariwisata ini terhadap masyarakat Bandar yaitu pemaksaan penjualan tanah tanpa melibatkan warga dalam penentuan harga dan kedua relokasi warga kampung Bandar ini ke kampung lainnya dengan tetap menyewa tanah dengan harga yang juga ditentukan oleh perusahaan dengan mencicil atau kontrak. Penelitian ini menemukan terjadi proses eksklusi sosial akibat pembangunan pariwisata Tanjung Lesung melalui 4 mekanisme yaitu force (pemaksaan jual-beli lahan), market (penjualan tanah melalui mekanisme pasar), regulasi peraturan penetapan perluasan lahan pariwisata), dan legitimasi (pengakuan/klaim lahan hak milik perusahaan) (Jamilah & Fitri, 2023).

Ega Hamdalah Kholid, 2019, Eksklusi Sosial Masyarakat Miskin Kampung 200 di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Penelitian ini membahas tentang eksklusi sosial yang terjadi pada masyarakat miskin Kampung 200 yang ada di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksklusi sosial masyarakat miskin di Kampung 200 terjadi permasalahan pada dua aspek dari keempat aspek eksklusi sosial. Permasalahan tersebut yakni kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok

dan kurangnya akses terhadap hak-hak sosial dasar. Permasalahan tersebut bersumber dari kurangnya keterampilan masyarakat miskin dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, metode observasi dan wawancara, dan dokumentasi sebagai fondasi utama untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi atau peristiwa yang relevan dengan topik penelitian, sehingga peneliti dapat menyaksikan perilaku, interaksi, dan dinamika yang berlangsung secara alami. Sementara itu, wawancara memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali informasi yang lebih detail mengenai perspektif, pengalaman, dan pandangan individu yang terkait dengan topik yang diteliti. Dengan memadukan observasi dan wawancara, peneliti mampu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti serta menjelajahi dan mendalami aspek-aspek yang mungkin tidak terungkap jelas melalui satu metode saja.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di desa Padang, kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dipilih di salah satu dusun yang berada di salah satu desa di kabupaten bulukumba yaitu Desa Padang kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan karena adanya Kerentanan Tinggi: Keluarga miskin seringkali berada dalam situasi yang lebih rentan

terhadap berbagai bentuk eksklusi sosial. Terkait dengan waktu penelitiannya itu dimulai pada bulan Februari sampai Maret 2025 dan akan dilanjutkan hingga penelitian ini mendapatkan data - data yang diperlukan oleh peneliti dalam rangka menyelesaikan penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah Eksklusi Sosial Terhadap Keluarga Prasejahtera di Desa Padang, Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya eksklusi sosial terhadap anggota keluarga miskin dan pengimplementasian pada penelitian tersebut.

### **D. Data dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder :

#### **1. Data primer**

Data untuk penelitian mengenai Eksklusi Sosial Terhadap Anggota keluarga miskin dapat meliputi Wawancara mendalam akan dilakukan untuk menggali pengalaman langsung, persepsi, dan perasaan peserta terkait eksklusi sosial yang mereka alami. Selain itu, observasi partisipatif akan membantu memahami konteks sosial dan budaya di mana eksklusi tersebut terjadi.

Kami juga akan melakukan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam individu atau keluarga tertentu, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih kaya. Untuk melengkapi analisis ini, penelitian akan mencakup pengkajian dokumen-dokumen seperti kebijakan pemerintah, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan catatan pribadi,

guna mengidentifikasi pola dan tren yang ada.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan meliputi laporan dari data Pemerintah setempat atau lembaga terkait mengenai implementasi dan respons terhadap “Eklusi Sosial Terhadap anggota Keluarga Yang Mengalami Kemiskinan”, Yaitu Adanya Sensus Yang Menyediakan Informasi Mengenai Demografi, Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Dan Pendapatan Masyarakat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS):

Menyajikan Data Mengenai Kondisi Kehidupan Masyarakat, Termasuk tingkat kemiskinan. Data Administrasi: Berasal dari catatan sipil, catatan kesehatan, dan catatan pendidikan yang dikelola oleh instansi pemerintah. Laporan Pemerintah: Mengandung informasi mengenai program-program sosial, inisiatif pembangunan, dan kebijakan yang berkaitan dengan isu kemiskinan.

## E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dikarenakan peneliti dapat dengan mudah memilih sampel yang paling bermanfaat dan yang paling sesuai berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang telah peneliti cantumkan, sehingga peneliti dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- i. masyarakat eksklusi sosial terhadap anggota keluarga yang mengalami kemiskinan
- ii. masyarakat lokal area peneliti.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data yang khas dalam pendekatan mix method, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data lapangan yang relevan dengan studi ini melalui beberapa teknik, antara lain:

### **1. Teknik Observasi**

Observasi dalam konteks penelitian ini melibatkan perhatian yang mendalam terhadap objek tertentu, memanfaatkan semua indera untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian mix method, alat observasi digunakan sebagai pelengkap bagi teknik wawancara yang telah dilakukan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk secara langsung melihat dan mencatat objek yang diteliti, sehingga dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Sebelum melakukan observasi, peneliti perlu memahami berbagai variasi dalam pengamatan serta peran yang mereka mainkan.

### **2. Teknik Wawancara**

Dalam penelitian mix method, wawancara dimanfaatkan untuk menggali informasi yang meliputi masa lalu, masa kini, dan pandangan ke depan. Proses ini menghasilkan data yang bersifat terbuka, komprehensif, dan tanpa batas, sehingga memberikan gambaran yang

lebih menyeluruh dalam penelitian. Wawancara dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan informan atau subjek penelitian, yang bisa dilakukan dengan mengikuti panduan wawancara atau secara lebih fleksibel. Selama wawancara berlangsung, pewawancara juga berusaha memahami konteks sosial informan, sehingga dapat mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

### 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi memainkan peran penting dalam penelitian dengan menerapkan pendekatan analisis. Selain itu, dokumentasi ini juga digunakan untuk menemukan bukti-bukti sejarah, serta untuk menelusuri landasan hukum dan peraturan-peraturan yang pernah ada. Subjek penelitian dapat mencakup beragam sumber, seperti buku, majalah, dokumen resmi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, hingga benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak. Dalam konteks penelitian kualitatif, dokumen berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari objek yang diteliti (Alhamid, thalha; anufia, 2019).

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang valid dan mudah dipahami oleh masyarakat secara umum.



Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dijelaskan dalam teknik analisis data:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Oleh karena itu, analisis data yang dikenal sebagai reduksi data menjadi sangat penting. Reduksi data melibatkan pengumpulan dan perangkuman kata-kata yang dianggap signifikan, diikuti dengan pencarian tema dan pola yang relevan. Dengan melakukan reduksi data ini, informasi yang disampaikan dapat menggambarkan sinergi dengan lebih jelas.

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan informasi mengenai Eksklusi sosial terhadap keluarga yang mengalami kemiskinan. Penyajian data ini akan mempermudah perencanaan dan pengambilan keputusan.

### 3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi Data

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan (Sofwatillah et al., 2024). Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya.

Namun, jika kesimpulan awal tersebut mendapat dukungan dari bukti yang valid dan tetap konsisten saat peneliti melakukan penelitian ulang, maka kesimpulan mengenai eksklusi sosial terhadap anggota keluarga yang mengalami kemiskinan dapat dianggap sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya.

## **H. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data adalah proses mengtriangulasikan tiga data yang terdiri dari data observasi, wawancara, dan dokumen. Berikut beberapa teknik yang umumnya digunakan:

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa informasi yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Dalam konteks penelitian ini, validasi data melibatkan survei pendapat warga, observasi langsung di lokasi saat acara berlangsung, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Survei memberikan perspektif langsung dari masyarakat, observasi menawarkan gambaran yang praktis, sementara wawancara menyajikan sudut pandang berbeda mengenai penyelenggaraan acara tersebut. Dengan menggabungkan ketiga sumber informasi ini, kita dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang respons masyarakat terhadap eksklusi sosial yang dialami oleh anggota keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

### **2. Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu adalah pendekatan yang melibatkan

pengumpulan data pada berbagai titik waktu dalam selang waktu tertentu. Dalam konteks penelitian eksklusi sosial terhadap anggota keluarga yang mengalami kemiskinan, ini berarti mengumpulkan data pada berbagai periode untuk melihat bagaimana pengalaman dan persepsi individu atau kelompok berubah seiring waktu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika eksklusi sosial dan bagaimana faktor-faktor tertentu berubah atau tetap konsisten.

### **I. Instrumen Penelitian**

Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

#### **1. Observasi**

Observasi dalam hal ini berarti peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kasus yang diteliti. Dengan melakukan observasi secara langsung, peneliti bisa lebih bisa memahami situasi dan kondisi yang sebenarnya. peneliti, sehingga dengan dilakukannya observasi secara langsung seperti:

- a) Observasi Perilaku yaitu responden menunjukkan gejala stres dan kecemasan saat berinteraksi dengan orang lain., anggota keluarga responden jarang berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas, responden memiliki kesulitan berkomunikasi efektif dengan anggota keluarga lainnya.
- b) Observasi Interaksi Sosial yaitu responden memiliki sedikit kontak dengan tetangga dan komunitas sekitar, anggota keluarga responden mengalami diskriminasi dari masyarakat sekitar, dan responden tidak memiliki jaringan sosial yang kuat.

memiliki kesulitan mengakses kredit dan layanan keuangan.

- c) observasi fisik yaitu responden tinggal di rumah yang tidak memadai dengan dinding yang retak dan atap yang bocor, Kondisi lingkungan sekitar rumah responden sangat tidak seimbang dan kumuh, responden tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas dialog antara peneliti dan narasumber. Dalam proses ini, peneliti mengemukakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sasaran utamanya adalah memperoleh informasi yang lebih menyeluruh dan terperinci.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menambah informasi yang sudah tersedia. Pengumpulan data lewat dokumen sangat berguna untuk memahami dan menambah informasi penting yang mendukung data dari sumber lain. Perangkat yang digunakan dapat mencakup buku catatan, pena, kamera, serta alat perekam suara.

## J. Etika Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti wajib mengikuti etika yang berlaku. Etika ini krusial agar peneliti dapat bertindak secara profesional mulai dari pengumpulan data, penulisan laporan, hingga publikasi hasil penelitian.

Berikut beberapa etika penelitian yang harus di perhatikan peneliti:

1. **Konsentratif Partisipasi:** Pastikan partisipasi sukarela dan informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait Eksklusi Sosial Terhadap Anggota Keluarga Miskin Jelaskan tujuan penelitian secara terbuka kepada responden.
2. **Hormati Privasi dan Anonimitas:** Jaga kerahasiaan informasi pribadi para responden, data yang terkumpul kerahasiaannya dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata.
3. **Objektivitas dalam Observasi:** Amati perilaku sosial tanpa mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Pastikan observasi dilakukan dengan objektivitas, tanpa mempengaruhi atau mengubah perilaku yang diamati.
4. **Keragaman dalam Representasi:** Pastikan keberagaman dalam pemilihan sampel. Ini memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat yang penelitian terkait.
5. **Penafsiran yang Jujur:** Sampaikan temuan penelitian tanpa distorsi atau kecenderungan pribadi. Berikan interpretasi yang jujur dan berdasarkan data yang terkumpul.
6. **Publikasi yang Bertanggung Jawab:** Publikasikan hasil penelitian dengan keakuratan dan kejujuran.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Eksklusi Sosial di Dunia**

Eksklusi sosial adalah sebuah proses atau keadaan yang menghalangi dan menghalangi individu atau kelompok dalam berpartisipasi penuh dan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga dapat diartikan sebagai pengucilan atau memarginalisasikan atau menyinggirkan ke pinggiran masyarakat. Eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera merupakan fenomena kompleks yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, dengan akar sejarah yang panjang dan beragam.

Sejarah eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera bermula sejak zaman feodal, sistem kasta dan kelas sosial yang kaku telah meminggirkan kelompok miskin dari akses sumber daya dan kekuasaan. Revolusi industri memperparah kondisi ini dengan urbanisasi yang menciptakan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan. Kolonialisme meninggalkan warisan diskriminasi dan eksploitasi yang terus mempengaruhi eksklusi sosial di berbagai negara.

##### **2. Sejarah Eksklusi di Indonesia**

Di Indonesia, sejarah eksklusi sosial juga kompleks. Pada masa pra-kolonial, sistem kasta dan hierarki, sosial membatasi akses kelompok tertentu. Masa kolonial Belanda memperparah ketidaksetaraan dengan kebijakan diskriminatif. Orde Baru, meskipun fokus pada pembangunan ekonomi,

seringkali mengabaikan pemerataan.

Era reformasi disisi lain, menghadapi tantangan disentralisasi dan konflik sosial yang dapat memperkuat eksklusi. Saat ini, diskriminasi akses terbatas terhadap layanan dasar, dan kesenjangan ekonomi terus menjadi faktor-faktor utama terjadinya eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera di Indonesia, yang juga diperparah dengan adanya ketidaksetaraan digital.

## B. Keadaan Geografis

### 1. Gambaran Umum Desa Padang



### 2. Letak Geografis

Desa Padang terletak di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini memiliki posisi yang strategis karena menjadi jalur penghubung transportasi dari Kota Bulukumba menuju Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.



### 3. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Padang memiliki luas daerah kurang lebih 1.108km<sup>2</sup> yang meliputi 4 dusun yaitu dusun Palimassang, Borong Cinranae, mattoangin dan Bt. Bulaeng.

### 4. Batas Wilayah

Kabupaten bulukumba terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Laut Flores.

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Teluk Bone

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

### 5. Topografi

Topografi Kabupaten Bulukumba, sebaifan besar berada pada ketinggian 0 hingga 1.000 meter diatas permukaan laut.

### 6. Kepadatan Penduduk

Penduduk Desa Padang tercatat sebanyak 4.039 jiwa, yang terdiri 2.119 jiwa dari laki-laki dan 1.920 perempuan, dengan jumlah kepala eluarga (KK) sebanyak 1.051 (*desapadang.id*).

### 7. Kondisi iklim

Kondisi Iklim lokasi penelitian memiliki iklim sedang hingga tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24,5°C sampai 28,9°C. Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan November hingga Februari, yang dapat menyebabkan timbulnya genangan air di berbagai wilayah.

### C. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk desa saat ini merupakan salah satu spek yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup masyarakat setempat. Berdasarkan data sensus penduduk kabupaten Bulukumba pada tahun 2020, jumlah penduduk desa Padang mencapai sebanyak 4.039 jiwa, yang terdiri 2.119 jiwa dari laki-laki dan 1.920 perempuan, dengan jumlah kepala eluarga (KK) sebanyak 1.051 (*desapadang.id*).

Kepadatan penduduk yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat terutama dalam akses fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam hal agama masyarakat desa padang dengan penganutan agama secara keseluruhan agama islam.

Keadaan penduduk desa padang menunjukkan bahwa desa ini memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Masyarakat desa menganut agama islam dan menggunakan berbagai bahasa yaitu indonesia bugis dan konjo.

### D. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi merupakan salah satu elemen utama yang memicu terjadinya eksklusi sosial pada keluarga prasejahtera. Keluarga yang berada dalam kondisi keuangan yang terbatas sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, atau bahkan pekerjaan yang baik. Saat pendapatan harian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka peluang untuk maju baik sosial maupun ekonomi menjadi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan jurang yang

semakin besar antara mereka dan komunitas yang lebih beruntung.

Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga prasejahtera sering kali diabaikan dari lingkungan sosial. Mereka dapat mengalami rasa malu, kurang percaya diri, atau bahkan dianggap “berbeda” oleh orang-orang di sekitar akibat kondisi ekonomi yang terbatas. Ketimpangan ini tidak hanya berpengaruh secara materi, tetapi juga memunculkan stigma sosial yang menyulitkan mereka untuk diterima sepenuhnya di masyarakat. Eksklusi jenis ini tidak selalu terlihat secara jelas, tetapi dirasakan dalam bentuk perlakuan, peluang, dan harapan yang tidak setara. Seiring berjalannya waktu, ini memperkuat siklus kemiskinan dan memperumit jalan keluar.

#### **E. Pemerintahan**

Dalam konteks pemerintahan, pengucilan sosial terhadap keluarga prasejahtera kerap terjadi disebabkan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung kelompok rentan. Walaupun berbagai program bantuan sosial telah diterapkan, faktanya masih banyak keluarga miskin yang belum terakses atau bahkan tidak menyadari keberadaan bantuan itu. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem pencatatan yang tidak tepat, birokrasi yang rumit, atau kurangnya informasi dari pihak pemerintah. Saat keluarga prasejahtera tidak memperoleh haknya dengan adil, mereka semakin teralienasi dari proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Sebaliknya, pemerintah terkadang terjebak dalam pendekatan yang seragam tanpa memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat di lapisan bawah. Program-program yang seharusnya mendukung, kadang tidak berfungsi dengan

baik karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan. Akibatnya, bantuan yang disalurkan hanya bersifat sementara dan tidak dapat mengubah keadaan mereka dalam jangka panjang. Dalam keadaan seperti ini, keluarga prasejahtera terlihat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan sistem yang kokoh, sementara negara sebagai pelindung justru terlihat jauh dan tidak hadir secara keseluruhan dalam kehidupan mereka.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera bukan hanya mengenai kemiskinan, tetapi juga tentang posisi mereka dalam konteks masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluarga yang berada dalam kondisi terbatas justru tidak menerima perlakuan yang serupa dengan kelompok lain yang lebih berkecukupan. Mereka kerap kali harus menghadapi fakta bahwa akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang baik menjadi sangat sulit diperoleh. Saat mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar sekolah anak, berobat ke rumah sakit, atau mengikuti pelatihan kerja, otomatis mereka akan tertinggal dari kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat lain.

Berbagai bentuk eksklusi sosial ini timbul dalam banyak aspek, baik secara eksplisit maupun implisit. Contohnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu mungkin menerima perlakuan yang berbeda di sekolah karena tidak dapat membeli seragam baru atau peralatan belajar yang memadai. Dalam lingkungan domestik, keluarga yang kurang mampu mungkin sering diabaikan dalam aktivitas masyarakat atau dianggap rendah karena dianggap tidak memberikan sumbangan. Bahkan dalam kebijakan sosial, mereka sering kali tidak didengar karena kesulitan dalam mengakses informasi atau minimnya perwakilan. Semua ini menunjukkan bahwa eksklusi sosial bukan hanya mengenai ketidakberdayaan, tetapi juga soal ketidakdiakui.

## 1. Bentuk Eksklusi Sosial Terhadap Anggota Keluarga Prasejahtera Di Desa Padang Kabupaten Bulukumba

Eksklusi sosial atau yang disebut dengan marginalisasi sosial adalah sebuah bentuk dari tindakan untuk melakukan penyingkiran dan juga melakukan pengucilan ke dalam sebuah bentuk dari pinggiran masyarakat. Eksklusi sosial adalah fenomena di mana individu atau kelompok tertentu terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang seharusnya dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.

Dalam tindakan eksklusi sosial itu sendiri biasanya terjadi kemiringan atau ketidaksesuaian antara data yang benar-benar membutuhkan bantuan dengan data yang seharusnya tidak diperuntukkan.

Studi mengenai eksklusi sosial melalui wawancara memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai jenis penolakan dan pengucilan yang dialami oleh individu dan kelompok di masyarakat. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan adil.

### a. Kemiskinan Sebagai Sudut Pandang Terjadinya Eksklusi Sosial Terhadap Keluarga Prasejahtera

Kemiskinan sering kali menjadi penyebab utama terjadinya eksklusi sosial, terutama bagi keluarga prasejahtera. Dalam konteks ini, eksklusi sosial tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan finansial, tetapi juga melibatkan pengucilan dari akses kepada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang pantas, dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

Keluarga prasejahtera sering terperangkap dalam siklus kemiskinan struktural yang menyulitkan mereka untuk bebas dari kondisi kehidupan yang terbatas. Mereka mungkin tidak memiliki sumber daya keuangan untuk mendidik anak hingga tingkat yang lebih tinggi, tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang baik, dan kurang mendapatkan kesempatan kerja yang tetap.

Keadaan ini memperluas jurang sosial dan memperkuat stigma buruk yang melekat pada kelompok kurang mampu, sehingga mereka cenderung terpinggirkan dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi.

Sebagai akibatnya, suara dan kebutuhan mereka sering kali terabaikan dalam proses pengambilan kebijakan, menjadikan mereka tidak hanya miskin secara finansial, tetapi juga terasing secara sosial dan politik. Eksklusi sosial yang berasal dari kemiskinan ini adalah multidimensional dan sistemik, sehingga memerlukan pendekatan intervensi yang komperenshif dan berkelanjutan untuk mengatasinya.

Ibu Mia masyarakat penerima bantuan berupa PKH

“Waktu itu ada peninjau datang dan menanyakan kehidupan saya dimana yang sebelumnya saya penerima bantuan tersebut. Tapi karena saya sudah menikah dengan pelaut atau *parrenge* makanya pkh saya di putuskan dan bpjs gratis pun ikut di putuskan”. (Selasa, 25 maret 2025)

Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebijakan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPJS gratis sering diterapkan secara rigid tanpa memperhatikan dinamika serta konteks kehidupan masyarakat. Informan menyatakan bahwa ia dulunya adalah penerima



bantuan, tetapi setelah menikah dengan seorang pelaut (*parrenge*), haknya untuk menerima bantuan sosial segera dihentikan. Keputusan ini sepertinya dibuat hanya dengan asumsi bahwa keadaan ekonominya secara otomatis akan membaik karena status suaminya sebagai pelaut.

Namun, penafsiran ini mengindikasikan adanya bentuk pengucilan sosial yang berasal dari sistem kebijakan tersebut. Pihak pemerintah atau yang berwenang tampak menentukan kelayakan bantuan secara unilateral, tanpa melakukan evaluasi mendalam mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya dialami oleh keluarga setelah pernikahan. Sering kali, pendapatan seorang pelaut dapat bersifat tidak tetap atau musiman, dan tidak selalu memastikan kestabilan ekonomi keluarga. Apabila tidak terdapat sistem klarifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut, keputusan untuk menghentikan bantuan seperti ini justru memperkuat ketidakadilan dan menghalangi keluarga tersebut dari akses terhadap perlindungan sosial yang seharusnya masih mereka perlukan.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada ibu Sat.

“saya dari di pak desa melapor karena tiba-tiba diputuskan BLTku padahal *matayya* melihat kalau saya ini kurang mampu ndada kebunku apalgi sawahku yang ada hanya rumah itu rumahku tidak sebagus orang lain bisa dibilang rumahku hanya untuk tempat berteduh saja karema keotmi vasilitas juga seadanyan. Seandainya ndada anakku lain sering kasihka uang nda tau bagaimanami kehidupanku karena saya tidak bisama ikut potong padi di orang-orang. Ini kartuku kalau tidak di kasih terima betulanma BLT *kupotongmi* krn apa gunanya di simpan kalau tidak di ksh terimama na jelas-jelas mata melihat bemana kehidupanku saya *kodong*”.  
(Selasa, 08 april 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan rasa kecewa warga karena BLT yang biasa diterimanya tiba-tiba dihentikan. Ia merasa tidak adil sebab kondisi hidupnya jelas sulit: tidak punya kebun maupun sawah, rumahnya

sederhana hanya sekadar tempat berteduh, dan fasilitas yang ada sangat terbatas. Kehidupannya sehari-hari pun bergantung pada bantuan anaknya karena ia tidak mampu lagi bekerja seperti orang lain.

Ungkapan ini menggambarkan bahwa BLT sangat penting bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup. Ketika bantuan dihentikan, muncul rasa kecewa, tidak percaya, bahkan merasa disisihkan. Hal ini menunjukkan perlunya penyaluran BLT yang tepat sasaran agar benar-benar membantu warga yang paling membutuhkan dan mengurangi ketidakadilan sosial.

#### Wawancara ibu Anis IRT

Sebenarnya, ketika kita hidup dalam keterbatasan, banyak hal yang tampak sulit untuk dicapai. Contohnya, ketika ada acara di desa, seperti arisan, kerja bakti, atau pertemuan warga, rasanya tidak yakin untuk ikut serta. Terkadang bukan disebabkan oleh kemalasan, melainkan karena kekurangan uang untuk membayar iuran atau merasa malu dengan penampilan yang biasa. Terlebih lagi jika ada acara yang memerlukan sumbangan, kami yang kurang mampu jadi enggan untuk berpartisipasi. Lama-kelamaan jadi terbiasa untuk sendiri dan tidak dilibatkan. (Kamis, 10 April 2025).

Saya percaya bahwa kemiskinan bukan hanya mengenai kurangnya uang, tetapi juga tentang cara orang memperlakukan kita. Ketika keluarga saya sedang dalam kesulitan yang mendalam, segalanya terasa sangat jauh. Saya sering merasa ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa seperti arisan atau gotong royong, karena tidak memiliki uang untuk iuran atau merasa malu dengan pakaian serta penampilan yang sederhana. Lama-kelamaan merasa alienasi sendiri di tengah komunitas. Bukanlah kami tidak ingin berpartisipasi, namun terkadang situasi yang membuat kami merasa tidak layak.

Anak-anak pun merasakan pengaruhnya. Mereka kerap merasa malu karena tidak memiliki peralatan sekolah yang serupa dengan teman-temannya. Beberapa orang bahkan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan dana. Namun yang menyedihkan, orang-orang justru menganggap kami tidak menghargai pendidikan. Sebenarnya bukan demikian, kami hanya benar-benar tidak memiliki kemampuan.

Saya juga pernah merasakan bahwa hidup dalam kemiskinan seakan-akan segala jalan tertutup. Ingin memulai bisnis tapi tidak punya modal, ingin bekerja juga sulit karena kurang memiliki keterampilan yang cukup. Bantuan dari pemerintah terkadang tidak sampai kepada kami, atau

kami bahkan tidak sadar akan adanya bantuan. Masyarakat sering kali keliru, mereka mengira kami tidak mau berusaha. Namun, kami juga ingin menjalani hidup yang layak seperti orang lain. Namun, tidak semua individu memiliki kesempatan yang setara sejak awal.

Wawancara ibu fate:

Tidak selalu begitu. Ada suatu ketika terdapat bantuan pangan dan juga distribusi bibit pertanian, tetapi kami tidak menerima. Dia bilang karena kami tidak tercatat. Namun saya menyaksikan sendiri, ada yang lebih mampu justru terdaftar. Terkadang saya merasa bingung, apakah ini disebabkan karena kami tinggal jauh dari pusat desa, atau karena tidak mengenal orang di dalam? Terasa seolah kami tidak dianggap pantas untuk mendapatkan bantuan, meskipun kami jelas-jelas hidup dalam kesulitan. Itu yang membuat kami merasa terpinggir. (Kamis, 10 April 2025).

Saya masih sangat ingat, saat itu ada distribusi pangan dan penyediaan bibit pertanian yang konon ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi keluarga kami tidak memperoleh apapun. Dia berkata bahwa kami tidak terdaftar. Saya merasa aneh, sebab sebenarnya ada beberapa orang lain yang kehidupannya jauh lebih baik dari kami, tetapi mereka malah tercatat sebagai penerima. Aku tidak ingin berprasangka buruk, tetapi aku benar-benar tidak paham mengapa kami tidak terlibat. Apakah ini disebabkan karena kami menetap di area pedesaan yang terpencil dari kantor? Atau karena kita tidak memiliki kedekatan dengan perangkat desa?

Perasaan yang timbul saat itu tidak hanya rasa kecewa, tetapi juga seperti diabaikan. Kami hidup dalam keterbatasan, berusaha setiap hari, namun saat ada dukungan yang seharusnya bisa mengurangi beban, justru

kami terlupakan. Seakan-akan kami tidak berharga. Itu yang membuat kami merasa terasing dan tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam hal sosial dan administratif. Terasa seolah kami terasing dari perhatian, meskipun kami merupakan bagian dari desa ini, bagian dari komunitas yang sama.

Wawancara bapak Ansar petani.

“ada pembagian bibit cocoa tapi tidak na informasikan kepada seluruh masyarkat bilang kasih masuk data kebunta supaya bisaki dapat. *Iyaro, tau makawe edemi missengi. Nappa aro tau mattarimae maegangngi pada iyanatommi kero di kanotoro ede nappa engka 50 pong tania pato arodo. Nasengsi tau iyaro gare kokota tania di padang, naidi lokasina kokota bontoraja malai*”.  
(Selasa, 08 April 202)

Berdasarkan hasil wawancara maka kemiskinan sebagai sudut pandang dari eksklusi soial itu sendiri karena tidak adanya sifat transparan terjun secara langsung untuk mensurvei sehingga tidak terjadi lagi tindkan yang memarginalisasikan. Saat itu terdapat program distribusi bibit kakao, namun tidak diberitahukan secara terbuka kepada semua warga. Hanya beberapa orang yang aware, dan mereka diminta untuk menyerahkan informasi kebun mereka agar dapat memperoleh bantuan itu. Saya baru menyadari setelah program tersebut dimulai dan orang-orang mulai membahasnya. Akhirnya, bantuan hanya diterima oleh mereka yang telah akrab atau sering berinteraksi dengan kantor desa. Sementara itu, kami yang benar-benar memerlukan justru tidak tahu sedikit pun tentang program tersebut.

Dari cerita ini, jelas bahwa eksklusi sosial dapat timbul dari

komunikasi dan distribusi informasi yang tidak seimbang. Saat informasi hanya diterima oleh kelompok tertentu, sedangkan yang lain tidak mendapatkan kesempatan yang setara, maka akan muncul ketimpangan dalam akses terhadap manfaat. Program yang dirancang untuk mendukung masyarakat dengan adil justru menimbulkan rasa iri dan ketidakpercayaan terhadap sistem yang berjalan. Pada situasi ini, keluarga prasejahtera yang seharusnya diutamakan malah terpinggirkan karena tidak termasuk dalam jaringan informasi itu.

Selain itu, cerita ini juga memperlihatkan bahwa lokasi hunian menjadi penentu siapa yang bisa mendapatkan akses bantuan. Penduduk yang berada di lokasi terpencil dari pusat pemerintahan desa, seperti yang bermukim di Padang, sering kali kurang mendapatkan informasi dibandingkan dengan yang tinggal di area yang lebih dekat, seperti Bontoraja Malai. Ini menguatkan bentuk eksklusi sosial yang berbasis geografis dan sering kali tidak disadari. Namun, komunitas yang tinggal di lokasi terpencil sering kali memerlukan bantuan lebih banyak karena akses mereka terhadap sumber daya sangat terbatas.

b. Fisik Yang Lemah Sebagai Sudut Pandang Terjadinya Eksklusi Sosial Terhadap Keluarga Prasejahtera

Kondisi fisik yang tidak prima, baik disebabkan oleh penyakit kronis, disabilitas, atau keadaan kesehatan yang buruk, sering kali menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pengucilan sosial terhadap keluarga prasejahtera. Dalam banyak situasi, anggota keluarga yang mengalami keterbatasan fisik tidak dapat berfungsi secara maksimal atau bahkan tidak

mampu bekerja, sehingga memberikan dampak signifikan pada keadaan ekonomi keluarga.

Saat produktivitas berkurang, pendapatan rumah tangga tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan kondisi ini memperkuat stigma sosial bahwa mereka adalah "beban bagi masyarakat". Keterbatasan fisik pun menghalangi keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial dan komunitas, seperti kegiatan kemasyarakatan, pendidikan, atau akses ke program bantuan yang memerlukan mobilitas atau kehadiran langsung.

Sebagai konsekuensinya, keluarga itu semakin terisolasi dan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial di sekitarnya. Eksklusi sosial dalam konteks ini tidak hanya berasal dari kondisi fisik itu, tetapi juga dari minimnya akses ke fasilitas kesehatan, alat bantu, serta perlindungan sosial yang seharusnya mengatasi keterbatasan tersebut.

Tanpa adanya intervensi yang menyeluruh, keluarga prasejahtera dengan anggota yang memiliki kondisi fisik rentan akan tetap terjebak dalam siklus keterbatasan yang kompleks, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Wawancara Bapak uks.

*“engka pura dataka nasengi anu bantuan tpi beberapa ualnmi ini tidak cair tidaka adami lgi impona foto bawammi aro ettue nala silong KTP na KK. Padahal dulu saya masih dapat ikut bekerja serabutan, membantu mengangkut barang atau berpartisipasi di kebun. Namun kini, sejak mengalami sakit, tubuh saya tidak sekuat sebelumnya. Bahkan untuk bekerja saja tidak mampu, terutama jika harus mengangkat barang-barang yang berat. Itu juga yang membuat saya tidak sering hadir di acara desa. Orang mungkin berpikir saya malas atau tidak ingin terlibat, padahal saya*



sebenarnya tidak mampu secara fisik. Seiring waktu, saya merasa semakin terasing. Tidak ada yang mengundang atau menawarkan bantuan, seolah saya tidak dianggap bisa berkontribusi lagi. Jika kita dalam keadaan sehat, banyak orang yang datang untuk berbincang atau meminta bantuan. Tetapi ketika rasa sakit datang atau tubuh tidak sekuat sebelumnya, orang-orang mulai menjauh. Tidak seorang pun yang datang menanyakan kabar. Kita merasa seolah dilupakan. Dulu, ketika masih bertenaga, saya sering membantu orang lain. Namun sekarang, karena kondisi tubuh sudah lemah, saya dianggap tidak berharga. Itu yang paling menyedihkan bukan hanya badan yang lemah, tetapi juga hati terasa kosong dan kurang dihargai lagi”.(Senin, 14 april 2025)

Lebih lanjut, narasumber juga mengatakan mengenai pergeseran sikap masyarakat terhadap dirinya setelah keadaan fisiknya menurun. Saat masih bugar, ia sering terlibat dalam berbagai kegiatan dan diminta tolong oleh tetangga. Akan tetapi setelah fisiknya tak lagi sekuat sebelumnya, secara bertahap perhatian masyarakat mulai memudar.

Menurut saya, keadaan fisik yang kurang baik sangat berdampak pada kehidupan, tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dalam interaksi sosial. Dahulu, ketika tubuh masih bertenaga, saya dapat berpartisipasi dalam pekerjaan serabutan, mengangkut barang, atau membantu di ladang. Namun setelah sakit, saya tidak mampu lagi. Sejak saat itu, perlahan saya merasakan jarak yang semakin menjauh. Orang-orang tidak lagi mengundang saya untuk turut serta dalam kegiatan kampung atau kerja bakti. Mereka mungkin menganggap saya malas, padahal saya sebenarnya tidak kuat secara fisik. Lama-kelamaan saya merasa seolah tidak diperhatikan, meskipun saya masih ingin berperan, namun tubuh ini sudah tidak mendukung lagi.

Tak hanya mengenai pekerjaan, bahkan dalam hal bantuan pun kami

yang memiliki keterbatasan fisik sering kali terabaikan. Saya pernah mencoba mendaftar bantuan, tetapi karena saya tidak bisa berjalan jauh dan tidak mengerti prosesnya, saya tidak bisa berpartisipasi. Sedangkan bagi yang sehat, mereka bisa datang langsung dan mengurusnya sendiri. Sepertinya sistem ini tidak memperhatikan keadaan kami yang terbatas. Terutama ketika sudah lanjut usia dan dianggap tidak efisien, bantuan seolah hanya diberikan kepada yang dapat bekerja. Hal itu paling dirasakan ketika fisik menurun, tidak hanya energi yang lenyap, tetapi juga perhatian serta pengakuan dari orang-orang di sekitar pun ikut sirna.

Sikap orang-orang juga mengalami perubahan. Ketika kita berada dalam keadaan sehat, banyak orang yang menghampiri untuk meminta bantuan atau hanya untuk bertegur sapa. Namun setelah sakit, sunyi. Tidak ada yang tiba, tidak ada yang menanyakan keadaan. Seperti kita sudah tidak dianggap penting lagi karena tidak dapat berkontribusi atau berfungsi. Dulu saya sering membantu orang lain, tetapi sekarang karena fisik tidak sekuat dulu, saya merasa benar-benar terasing bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dari perhatian, dari masyarakat, dari kehidupan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi fisik yang tidak baik tidak hanya berpengaruh pada keterbatasan ekonomi, tetapi juga berdampak pada penerimaan sosial dari lingkungan sekitar. Eksklusi yang dialami informan terjadi secara bertahap namun jelas dimulai dari tidak terlibat dalam kegiatan, kesulitan untuk mengakses bantuan, hingga menurunnya interaksi sosial di sekitarnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa batasan fisik

merupakan salah satu perspektif penting dalam memahami bagaimana eksklusi sosial menimpa keluarga prasejahtera.

Fajri penerima bantuan perlengkapan sekolah.

“ini pembagian perlengkapan sekolahnya di kasih terimaka karena saya termasuk orang kurang mampu ka meninggalmi bapakku mamaku mami sebagai tulang punggung keluarga na kakakku sudahmi menikah untung kalau ada rezekinya lebih biasa tongja na kasiah kodong. Baru yang terima begini 2 orng ja di palimassang terbagi dan bergiliran bedo mendapat na saya ini baruma lgi dapat”. (Rabu, 16 april 2025)

Ibu Mir tim penyaluran pembagian perlengkapan sekolah secara gratis.

“ini pembagian perlengkapan sekolah sebelumnya itu di infokan kesemua dusun bahwa cari dan data wargata yang bersekolah yang perlengkapan sekolahnya itu kung bagus di pakai apalagi anak yang single parent”. (Rabu, 16 april 2025)

Dari hasil wawancara diatas dengan adanya pembagian seragam sekolah yaitu dapat meringankan beban orang tua dalam kebutuhan bersekolah apalagi dengan anggota keluarga yang benae-benar membutuhkannya.

#### c. Keterasingan/Marginalisasi

Keterasingan atau marginalisasi adalah perspektif penting dalam memahami terjadinya eksklusi sosial terhadap keluarga kurang mampu. Keluarga yang sejahtera kadang-kadang tinggal di area dengan akses terbatas—baik dalam hal pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, maupun partisipasi dalam kegiatan sosial. Keadaan ini membuat mereka terasing dari dinamika sosial yang penting dan tidak memiliki tempat yang setara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atau pengembangan komunitas.

Selain itu, pandangan negatif masyarakat tentang kemiskinan memperkuat perasaan terasing mereka, sehingga keluarga prasejahtera merasa tidak dihargai, tidak diakui, dan tidak dianggap sebagai bagian penting dari komunitas sosialnya. Marginalisasi ini juga bisa bersifat struktural, contohnya melalui kebijakan yang tidak mendukung atau kurang mencakup kelompok yang kurang mampu. Sebagai akibatnya, eksklusi sosial semakin mengakar karena keluarga prasejahtera tidak hanya mengalami keterbatasan finansial, tetapi juga kehilangan hubungan sosial, rasa percaya diri, dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Keterasingan atau marginalisasi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya eksklusi sosial bagi keluarga prasejahtera. Marginalisasi terjadi saat individu atau kelompok tertentu, dalam hal ini keluarga berpendapatan rendah, terisolasi dari proses sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat.

Wawancara ibu war :

Kami tinggal sedikit jauh dari pusat desa, di ujung bagian. Hunian kami kecil dan terpencil dari jalan utama. Oleh sebab itu, jarang ada orang yang berkunjung atau hanya menyapa. Data mengenai kegiatan desa juga sering kami terima dengan keterlambatan. Maka kami kerap merasakan ketertinggalan, tidak mengetahui apa yang terjadi. Bergabung pun terasa kurang nyaman, karena sudah terlambat mengetahui. Itu yang membuat kami semakin merasa terasing, seolah-olah hidup sendiri di lokasi yang sama. (jum'at 18 April 2025).

Kami tinggal cukup jauh dari pusat desa, di bagian paling ujung. Tempat tinggal kami bukanlah besar dan posisinya cukup terasing, jauh dari jalan utama. Oleh karena itu, sangat jarang ada orang yang mengunjungi rumah, bahkan untuk sekadar menyapa pun jarang dilakukan. Kami sering menerima informasi mengenai kegiatan desa dengan terlambat. Kadang

baru menyadari setelah acara selesai atau sudah berlangsung.

Sepertinya kami selalu tertinggal. Ingin ikut kegiatan tetapi merasa ragu, karena sudah terlambat dan tidak mengetahui apa-apa. Lama-kelamaan, kami merasakan seolah hidup sendirian di kampung ini. Seperti ada batas yang tak terlihat, namun dirasakan kami berada di desa yang sama, tetapi tidak benar-benar terlibat dalam kehidupan bersama. Itulah yang semakin membuat kami merasa terasing.

Wawancara kepada ibu nurwati irt.

*“itu saya kodong karna nda di kasima bantuan PKH dan semacamnya jadi saya biasa pergi menanam dan potong padi karena ndadami juga suamiku yang mau hidupika.na itu biasa hasil begituku ku putar jadi modal usaha wattuna bulan puasa kodong untuk di pke belanja hari-hari hasilnya itupun biasa nda cukup kasian” (Ahad, 20 april 2025).*

Saya merasa prihatin, karena tidak pernah menerima bantuan seperti PKH atau bantuan sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan hidup, saya sering pergi menanam dan memanen padi. Tidak ada alternatif lain, karena suami saya juga tidak dapat banyak membantu, sehingga saya harus berjuang sendiri agar bisa terus mencukupi kehidupan.

Hasil dari pekerjaan tersebut biasanya saya gunakan kembali, saya jadikan modal untuk usaha kecil, terutama saat mendekati bulan puasa. Saya gunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tetapi, hasilnya sering kali tidak memadai. Terkadang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kadang harus dihemat. Nampaknya sulit, namun tidak ada pilihan lain, demikianlah faktanya.

Fira pelayan warung makan.

*“karena saya ini tidak punya ijazah SMA makanya saya kerja di kota sebagai pelayan warung untuk menghidupi kebutuhan anakku dengan sendiri tanpa ada suami. Itupun biasa kodong nda cukup jdi biasa tongma itu na bantu orang tua belanjai cucunya. Na yang seharusnya itu seperti sayami ini di kasih bantuan tapi nyatanya ndadaji pernah saya terima dari pemerintah”. (Senin, 21 april 2025.).*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat terlihat jelas bahwa di lokasi penelitian tersebut terlibat tidak dapat mertakan bantaun sosial yang semestinya berhak mendapatkannya. Keluarga prasejahtera biasanya berada di daerah dengan sumber daya yang sedikit, akses ke layanan publik yang rendah, dan lokasi yang terpencil dari pusat-pusat aktivitas sosial. Mereka jarang disertakan dalam forum komunitas, proses pengambilan keputusan, atau program pembangunan karena dianggap tidak memberikan kontribusi yang memadai. Sebagai hasilnya, mereka mengalami batasan tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial akibat hilangnya rasa memiliki dan ikatan dengan lingkungan di sekitarnya.

Di samping itu, stigma sosial yang terkait dengan kemiskinan juga memperkuat marginalisasi. Keluarga prasejahtera sering dianggap sebagai beban bagi masyarakat, kurang berpendidikan, atau tidak menghasilkan, yang membuat mereka terasing dari kesempatan kerja yang memadai atau penerimaan dalam komunitas sosial. Anak-anak berasal dari keluarga kurang mampu juga dapat menghadapi diskriminasi di sekolah, dan orang tua mereka dihindari dalam interaksi sosial masyarakat. Dalam jangka panjang, situasi ini menciptakan perasaan kurang percaya diri, frustrasi, dan rendah diri.

Saya tidak memiliki sertifikat SMA, sehingga saya pergi merantau ke

kota dan bekerja sebagai pelayan kafe. Itu adalah pekerjaan yang berhasil saya peroleh, mengingat pendidikan saya minimal. Dari situ saya berusaha memenuhi kebutuhan anak saya sendiri, karena saya memang membesarkannya tanpa suami. Namun sebenarnya, pendapatannya tidak memadai. Gaji harian yang saya dapat sering kali hanya mencukupi untuk makanan dan kebutuhan dasar yang diperlukan. Jika sudah tidak mencukupi, orang tua saya di desa sering membantu membeli kebutuhan cucunya. Meskipun mereka juga hidup dalam keterbatasan.

Apa yang membuat saya sedih adalah saya merasa seolah-olah tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Saya percaya bahwa individu seperti saya, yang mengasuh anak seorang diri, berjuang dengan pendapatan rendah, dan tidak memiliki gelar pendidikan tinggi berhak mendapatkan dukungan sosial. Namun hingga kini, saya tidak pernah terdaftar atau dipanggil untuk mendapatkan bantuan. Saya sering berpikir, apa ini disebabkan oleh tempat tinggal saya di kota? Atau sebab saya tidak paham cara mengurus bantuan? Seolah-olah kami ini tidak terlihat, meskipun kami juga merupakan warga negara.

Keadaan ini menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan dan status sebagai orang tua tunggal menjadi unsur yang memperkuat posisi kami dalam lingkup kemiskinan. Tidak hanya sulit untuk memperoleh pekerjaan yang baik, tetapi juga seakan terhalang dari akses bantuan yang dapat sedikit meringankan beban kehidupan. Sementara itu, dukungan yang tersedia kadang malah diterima oleh orang yang masih memiliki keahlian lebih dari



saya. Hal ini membuat saya merasa terasing, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perhatian dan keadilan sosial dari pemerintah

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Eksklusi Sosial Terhadap Anggota Keluarga Prasejahtera Di Desa Padang Kabupaten Bulukumba**

### **a) Pendidikan Dan Kesehatan**

Eksklusi sosial yang dialami keluarga prasejahtera disebabkan oleh beragam faktor yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah terbatasnya akses pada sumber daya dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai. Keluarga prasejahtera seringkali mengalami keterbatasan finansial dan sosial untuk mendapatkan layanan tersebut, sehingga mereka semakin terasing dari masyarakat luas. Di samping itu, diskriminasi dan stigma sosial juga merupakan faktor utama yang menyebabkan eksklusi.

Masyarakat sering melihat keluarga prasejahtera sebagai golongan yang malas, tidak berdaya, atau bergantung pada bantuan, yang selanjutnya memperkuat marginalisasi mereka. Kebijakan yang tidak inklusif dan minimnya jaminan sosial juga memperparah situasi ini, karena tidak mampu mengakses dan memberdayakan keluarga-keluarga miskin dengan baik. Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar juga memicu eksklusi sosial, karena menciptakan perbedaan yang semakin besar antara kelompok yang kaya dan yang miskin.

Dalam jangka panjang, situasi-situasi ini menciptakan siklus kemiskinan dan marginalisasi yang sukar diatasi tanpa adanya intervensi

kebijakan yang adil dan komprehensif. Eksklusi sosial terhadap keluarga pra-sejahtera diakibatkan oleh keterbatasan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan layak, serta diperburuk oleh stigma sosial dan diskriminasi yang mereka alami.

wawancara seorang ibu rumah tangga Maryam.

*"Saya berharap anak-anak bisa mendapatkan pendidikan tinggi, tetapi kami tidak memiliki dana." "Walaupun sakit, kami kadang lebih memilih untuk menunggu sembuh sendiri karena takut biaya rumah sakit." (Rabu, 23 april 2025)*

Pernyataan ini menggambarkan kendala yang mereka hadapi dalam mengakses layanan dasar. Selain itu, dalam wawancara dengan seorang tokoh masyarakat setempat, diungkapkan bahwa banyak keluarga prasejahtera merasa enggan terlibat dalam kegiatan sosial karena merasa tidak diterima atau dianggap berbeda oleh warga lain.

Wawancara Herul

Saya hanya menyelesaikan SD, dan karena itu saya sangat kesulitan mencari pekerjaan yang pantas. Saat terdapat peluang atau pelatihan, umumnya persyaratannya minimal adalah lulusan SMA. Walaupun saya ingin belajar dan berkembang, namun karena tidak memiliki ijazah, saya selalu terpinggirkan. Kami yang tidak berpendidikan tinggi ini sepertinya dianggap tidak mampu berkontribusi, padahal kami juga memiliki motivasi dan kemauan. Terkadang saya merasakan, pendidikan itu seperti dinding besar yang menghalangi kami untuk berkembang. (rabu,26 April 2025)

Wawancara ini menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera. Informan hanya menuntaskan pendidikan dasar (SD), dan keadaan ini telah menimbulkan kendala yang signifikan dalam akses terhadap kesempatan kerja serta pelatihan peningkatan

keterampilan. Ketika kesempatan yang dapat meningkatkan kehidupannya muncul, syarat administratif berupa ijazah menjadi halangan yang sulit dilalui.

Keadaan ini mengindikasikan bahwa individu dengan pendidikan rendah cenderung terpinggirkan secara sistematis dari berbagai kesempatan untuk pengembangan diri dan ekonomi. Walaupun mereka memiliki semangat dan harapan untuk berkembang, sistem serta kebijakan yang ada tidak menyediakan ruang yang inklusif untuk mereka. Pernyataan bahwa pendidikan ibarat "tembok tinggi" mencerminkan rasa frustrasi dan keterbatasan struktural yang dialami secara langsung oleh kelompok prasejahtera. Mereka tidak hanya mengalami kemiskinan ekonomi, tetapi juga terbatas secara sosial karena dipandang tidak mampu hanya berdasarkan pendidikan yang dimiliki.

Dalam konteks ini, pengecualian sosial tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga oleh sistem sosial yang menghubungkan nilai individu dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Sebagai hasilnya, individu yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi terus menerus terpinggirkan, jauh dari peluang yang seharusnya tersedia untuk semua. Interpretasi ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya hak, tetapi juga penentu status sosial individu dalam masyarakat.

Wawancara ibu war:

Sejujurnya, tidak. Dulu saya memiliki BPJS gratis, tetapi sekarang sudah tidak berlaku lagi karena katanya saya tidak terdaftar dalam data. Jika sakit, kami harus menanggung biaya sendiri, dan itu sangat sulit. Akhirnya, kami sering menghindari berobat. Jika tidak terlalu parah, biasanya bisa ditahan tahan. Saya juga pernah merasakan perlakuan yang berbeda di puskesmas, seperti kurang dihormati karena mengenakan pakaian sederhana. Situasi seperti itu membuat kami ragu untuk kembali, meskipun kami juga membutuhkan pelayanan yang serupa. (Rabu, 26 April 2025).

Wawancara ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu bentuk eksklusi sosial yang dialami oleh masyarakat yang kurang sejahtera. Informan menyatakan bahwa sebelumnya ia memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS gratis, tetapi kini sudah tidak berlaku lagi karena alasan administratif “tidak terdaftar dalam data.” Saat hak atas layanan dasar seperti kesehatan menjadi tidak terjangkau, beban ekonomi menjadi semakin berat. Pilihan untuk tidak berobat, meskipun dalam situasi sakit, mencerminkan kondisi terpaksa yang dialami banyak keluarga dengan keterbatasan finansial.

Selain hambatan administrasi dan ekonomi, wawancara ini juga menunjukkan aspek lain dari pengucilan sosial: perlakuan diskriminatif dalam layanan publik. Pengalaman diperlakukan tidak sopan di tempat kesehatan hanya karena memakai pakaian sederhana menunjukkan adanya stigma terhadap orang-orang kurang mampu. Hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap akses hak-hak dasar, tetapi juga memengaruhi kepercayaan diri dan keberanian mereka untuk meminta bantuan saat diperlukan.

Dari informasi ini, dapat dipahami bahwa eksklusi sosial bagi keluarga prasejahtera berlangsung dengan beragam tingkatan: dari pencabutan perlindungan sosial secara administratif, sampai pengalaman diskriminatif yang menyebabkan mereka merasa tidak layak menerima

layanan. Akibatnya, perasaan terpinggirkan semakin mendalam, dan mereka semakin enggan mengakses fasilitas yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai warga negara.

#### b) Stigma Sosial

Stigma sosial terhadap keluarga yang sejahtera menjadi salah satu penyebab utama terjadinya eksklusi sosial. Stigma ini timbul dari pandangan negatif masyarakat yang meyakini bahwa kemiskinan merupakan hasil dari sikap malas, ketidakmampuan, atau kegagalan individu dalam hidup.

Keluarga prasejahtera sering kali dianggap sebagai beban bagi masyarakat, bergantung pada bantuan dari pemerintah, atau tidak dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Pandangan ini menyebabkan mereka diperlakukan secara berbeda, terasing di lingkungan sosial, bahkan dianggap tidak layak untuk terlibat aktif dalam aktivitas masyarakat.

wawancara ibu RB sebagai IRT

*"biasa to mangali'ngaliki ikut hadir di pertemuan warga, karena takutki dianggap hanya datang saat ada bantuan." "Kami sebenarnya juga ingin terlibat." (Rabu,23 april 2025)*

Ucapan ini menunjukkan bagaimana stigma menimbulkan perasaan inferior dan keterasingan dalam interaksi sosial mereka. Seorang ketua RT, di daerah tersebut juga mengungkapkan,

*"Ada tongmo itu biang, kalau keluarga kurang mampu ikut rapat, pasti mintaji bantuan lagi." ( Kamis 01 Mei 2025)*

Komentar semacam ini mencerminkan bagaimana stereotip sosial memperkuat pemisahan antara “yang berdaya” dan “yang tidak berdaya,” sehingga menghalangi proses integrasi sosial. Stigma sosial tidak hanya menghasilkan jarak psikologis, tetapi juga menghalangi akses keluarga prasejahtera terhadap peluang untuk mengatasi kemiskinan.

c) Diskriminasi

Diskriminasi terhadap keluarga kurang mampu merupakan suatu perlakuan yang tidak adil yang dialami akibat kondisi ekonomi mereka yang rendah. Diskriminasi ini dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, layanan publik, pekerjaan, dan juga dalam interaksi sosial sehari-hari.

Keluarga prasejahtera sering kali diperlakukan secara tidak adil atau dianggap tidak pantas untuk menerima layanan dan peluang yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya. Contohnya, anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu mungkin menerima perlakuan yang tidak adil di sekolah, baik dari pendidik maupun teman-teman, yang pada gilirannya dapat mengganggu motivasi dan kepercayaan diri mereka.

wawancara dengan seorang ibu San dari keluarga prasejahtera, ia menceritakan,

*“waktuku itu kasian mau kasih sekolah anakku di sekolah unggulan di kota, ditanyakan adaji dekkengnukah”.*(Kamis, 01 Mei 2025)

Ungkapan ini menunjukkan bagaimana diskriminasi yang tidak terlihat terjadi dalam pelayanan publik. Bentuk-bentuk diskriminasi ini tidak hanya memperburuk eksklusi sosial, tetapi juga menghalangi mobilitas sosial

keluarga kurang mampu untuk keluar dari keadaan marginal yang mereka hadapi.

Wawancara ibu Rahma:

"Anakku pernah tidak diikutsertakan lomba di sekolah karena dianggap tidak mampu membeli seragam khusus seperti yang lain." Saya sangat merasa pilu, sebab seharusnya semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. "Tapi terkadang, jika orang tua tidak memiliki uang, anaknya juga akan terpinggirkan."( kamis, 27 April 2025)

Diskriminasi juga meluas ke sektor pendidikan, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama hanya karena masalah ekonomi. Apabila kesetaraan tidak dipertahankan sejak awal, maka eksklusi sosial bermula dari sekolah. Ini memperkuat siklus ketidakadilan antar generasi yang seharusnya dapat diakhiri dengan kebijakan yang inklusif dan mendukung kelompok lemah.

Hal ini menunjukkan bahwa pengucilan sosial tidak hanya dipicu oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh interaksi sosial yang membuat mereka semakin terisolasi. Narasi ini menegaskan bahwa eksklusi sosial merupakan masalah struktural yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berlandaskan empati.

Dari kesimpulan wawancara tersebut memperjelas bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan perlakuan sosial yang tidak setara. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu disertai dengan perubahan cara pandang masyarakat serta kebijakan yang menjamin kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga tanpa memandang status ekonomi.



## B. Pembahasan

Eksklusi sosial yang dialami oleh keluarga prasejahtera di Desa Padang, Kabupaten Bulukumba, muncul dalam berbagai bentuk yang sering kali tidak disadari langsung oleh masyarakat setempat. Salah satu manifestasi yang paling jelas adalah terbatasnya akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Banyak keluarga yang kesulitan membayar kebutuhan sekolah anak dengan baik, mulai dari seragam, buku, hingga ongkos transportasi.

Sebagai akibatnya, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu cenderung memiliki prestasi yang lebih rendah atau bahkan berhenti dari sekolah. Di sektor kesehatan, tantangan serupa juga muncul. Walaupun terdapat program jaminan kesehatan seperti BPJS gratis, tidak semua penduduk yang miskin menerimanya, terutama ketika status ekonomi mereka dinilai sepihak tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya.

Di samping itu, pengucilan juga terlihat dalam interaksi sosial dan keterlibatan masyarakat. Keluarga prasejahtera sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa atau kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mereka merasa kurang percaya diri, tidak percaya diri, atau bahkan dianggap “tidak berharga” oleh beberapa orang dalam masyarakat karena dianggap tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Stigma ini menyebabkan mereka semakin terasing, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari sisi psikologis dan sosial. Saat suara mereka terabaikan dan kebutuhan mereka tidak dipenuhi, eksklusi sosial semakin mendalam dan terus berulang dari generasi ke generasi.

1. Bentuk-Bentuk Eksklusi Sosial Terhadap Keluarga Prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba

Eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba muncul dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Bentuk pertama yang paling mencolok adalah eksklusi ekonomi, di mana keluarga prasejahtera kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, pendapatan stabil, dan sumber daya keuangan. Situasi ini secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Keadaan ekonomi yang cukup terbatas ini secara langsung berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka. Contohnya, untuk membeli makanan juga harus sangat berhemat, sehingga nutrisi anak-anak sering kali tidak tercukupi. Demikian pula dalam bidang pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali terpaksa berhenti sekolah lebih awal karena tidak sanggup membayar seragam, transportasi, atau biaya tambahan lainnya.

Sebaliknya, keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan juga menjadi hambatan. Tanpa adanya jaminan sosial atau BPJS, mereka harus menunda pengobatan hingga kondisi menjadi sangat parah. Semua ini membentuk siklus ketidakadilan yang menyebabkan mereka tetap terpinggirkan dalam kehidupan sosial.

Eksklusi ekonomi pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan uang atau pekerjaan, namun mengenai bagaimana kemiskinan secara bertahap merampas hak-hak dasar dan menjauhi keluarga prasejahtera dari kesempatan untuk hidup lebih baik. Tanpa campur tangan yang sesuai dari pemerintah atau

masyarakat, keadaan ini dapat berlanjut dari generasi ke generasi.

Bentuk kedua adalah eksklusi institusional, yang terlihat dari terbatasnya akses ke layanan publik dan administrasi pemerintahan. Banyak keluarga prasejahtera menghadapi kesulitan saat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, atau administrasi akibat kurangnya informasi, biaya yang tidak terlihat, atau perlakuan tidak adil dari petugas layanan. Ini menunjukkan bahwa sistem birokrasi belum sepenuhnya bersahabat dengan kelompok yang kurang mampu.

Selanjutnya, studi ini juga mengidentifikasi adanya eksklusi sosial-kultural, yang terlihat melalui stigma dan diskriminasi yang dialami oleh keluarga berpendapatan rendah dalam kehidupan sosial. Mereka sering dianggap sebagai kelompok yang tidak menghasilkan, malas, atau hanya bergantung pada dukungan. Dalam wawancara, responden menyatakan perasaan tidak percaya diri, malu, dan dijauhkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Tindakan ini menyebabkan mereka menjauh dari partisipasi sosial, seperti acara komunitas, pertemuan RT, atau aktivitas keagamaan.

Bentuk lain adalah pengucilan politik, yang ditandai dengan sedikitnya partisipasi keluarga prasejahtera dalam proses pengambilan keputusan di komunitas mereka. Hal ini disebabkan oleh minimnya rasa percaya diri, kurangnya data, serta kekuasaan kelompok-kelompok yang lebih kuat dalam struktur kekuasaan lokal.

Akumulasi berbagai jenis eksklusi ini menyebabkan dampak serius, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun sosial. Mereka merasakan

pengurangan kepercayaan diri, hilangnya semangat, dan terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diakhiri. Ketiadaan daya dan penolakan dari lingkungan sosial membuat posisi mereka semakin terasing.

Dengan cara ini, eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera tidak hanya berkaitan dengan kekurangan materi, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis, sosial, dan struktural yang rumit. Untuk menangani isu ini, diperlukan pendekatan lintas sektor yang tidak hanya menekankan bantuan ekonomi, tetapi juga pada transformasi sikap sosial, reformasi kelembagaan, dan penguatan komunitas.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Eksklusi Sosial Terhadap Keluarga Prasejahtera Di Desa Padang Kabupaten Bulukumba

Salah satu faktor utama yang memicu eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang, Kabupaten Bulukumba, adalah terlihatnya kesenjangan ekonomi yang mencolok dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga bertahan dengan pendapatan yang tidak cukup, bahkan untuk kebutuhan paling mendasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan yang layak. Pekerjaan serabutan seperti buruh tani, nelayan kecil, atau pekerja harian lepas yang tidak memiliki jaminan kerja maupun pendapatan tetap umumnya merupakan sumber penghasilan utama masyarakat desa. Saat mereka tidak dapat bekerja akibat cuaca, kesehatan, atau rendahnya permintaan tenaga kerja, secara otomatis tidak ada pendapatan. Keadaan ini menjadikan keluarga prasejahtera berada dalam posisi yang rawan secara finansial, di mana sedikit gangguan saja bisa membawa mereka lebih dalam ke dalam jurang kemiskinan.

Selain persoalan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga merupakan faktor krusial yang memperburuk eksklusi sosial. Banyak anak dari keluarga tidak mampu terpaksa menghentikan sekolah akibat keterbatasan dana dan prioritas keluarga yang lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari. Banyak juga anak-anak yang memutuskan untuk ikut membantu orang tua bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini menimbulkan kendala besar dalam pergerakan sosial, karena pendidikan merupakan faktor utama untuk memperoleh peluang kerja yang lebih baik. Akibatnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu berkembang dalam situasi yang serupa dengan orang tua mereka, dan ini mengakibatkan kemiskinan serta keterasingan menjadi warisan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, program pemberdayaan, atau bantuan sosial juga sering kali tidak seimbang. Meskipun pemerintah telah menawarkan berbagai jenis bantuan, kenyataannya tidak semua keluarga prasejahtera dapat mengaksesnya. Keterbatasan informasi, transportasi yang minim, dan proses birokrasi yang rumit menjadi kendala tersendiri. Di samping itu, sejumlah keluarga merasa ragu atau malu untuk mendapatkan bantuan karena khawatir diterpa stigma atau dianggap rendah oleh lingkungan sekitar. Sebagai akibat, mereka memutuskan untuk tetap tinggal dalam keterbatasan meskipun sebenarnya sangat memerlukan dukungan.

Aspek sosial dan budaya juga berkontribusi dalam memperkuat pengucilan terhadap keluarga prasejahtera. Di tingkat komunitas, masih kerap dijumpai sikap diskriminatif atau pandangan skeptis terhadap individu yang

hidup dalam kemiskinan. Keluarga yang kurang mampu sering kali dianggap tidak signifikan dalam proses pengambilan keputusan di desa, tidak dilibatkan dalam kegiatan masyarakat, dan tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Tindakan seperti ini menghasilkan jarak sosial yang memisahkan mereka dari masyarakat. Rasa rendah diri, kurang percaya diri, dan ketidakberanian untuk terlibat lebih dalam pun berkembang, sehingga mereka semakin terasing dari interaksi sosial. Apabila tidak diatasi dengan cara yang inklusif dan adil, eksklusi sosial ini dapat menguat dan menjadi penghalang berat bagi perkembangan sosial yang seimbang di Desa Padang.

Sehingga yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera adalah adanya perbedaan ekonomi yang cukup signifikan. Keluarga yang berada dalam keterbatasan sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan yang memadai. Akibatnya, mereka mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat secara tidak langsung menetapkan pemisahan antara individu yang dianggap "mampu" dan yang "tidak mampu".

Di Desa Padang, perbedaan ini nampak jelas dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang memadai, serta layanan kesehatan. Keluarga prasejahtera sering kali harus bergantung pada pendapatan harian yang tidak pasti, sedangkan tekanan kebutuhan terus bertambah. Saat kondisi ekonomi terbatas, mereka terpaksa mengesampingkan hal-hal yang seharusnya menjadi

prioritas, seperti pendidikan anak atau pemenuhan gizi keluarga. Sebagai akibatnya, keluarga prasejahtera sering terabaikan, jarang dilibatkan dalam aktivitas sosial, dan dianggap tidak setara.

Keadaan ini mengindikasikan bahwa individu dengan pendidikan rendah cenderung terpinggirkan secara sistematis dari berbagai kesempatan untuk pengembangan diri dan ekonomi. Walaupun mereka memiliki semangat dan harapan untuk berkembang, sistem serta kebijakan yang ada tidak menyediakan ruang yang inklusif untuk mereka. Pernyataan bahwa pendidikan ibarat "tembok tinggi" mencerminkan rasa frustrasi dan keterbatasan struktural yang dialami secara langsung oleh kelompok prasejahtera. Mereka tidak hanya mengalami kemiskinan ekonomi, tetapi juga terbatas secara sosial karena dipandang tidak mampu hanya berdasarkan pendidikan yang dimiliki.

Seringkali mereka juga menghadapi stigma buruk, seperti dianggap tidak rajin atau tidak berusaha. Sebagian besar dari mereka sebenarnya berusaha dengan keras, tetapi terperangkap dalam sistem yang tidak adil. Dengan demikian, eksklusi sosial tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi, tetapi juga oleh cara pandang masyarakat serta minimnya dukungan dari lembaga sosial dan pemerintah.

Faktor-faktor yang mengakibatkan eksklusi sosial ini sangat beragam dan saling terkait. Dari perspektif ekonomi, pendapatan yang minim mengakibatkan keluarga prasejahtera kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan perumahan yang layak. Dalam konteks sosial, mereka sering kali diabaikan atau bahkan dijauhkan. Budaya yang



cenderung mengevaluasi individu berdasarkan kekayaan juga menguatkan sekat antara kelompok yang berkemampuan dan yang tidak. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang tidak merata atau kurang mendukung kelompok rentan semakin memperburuk keadaan, contohnya adalah terbatasnya akses terhadap bantuan atau layanan publik.

Selain aspek ekonomi, minimnya perhatian dari pemerintah desa ataupun lembaga sosial juga merupakan penyebab eksklusi sosial yang terus terjadi. Data yang kurang akurat, distribusi bantuan yang tidak seimbang, serta rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam forum musyawarah desa, memperdalam kesenjangan antara kelompok prasejahtera dan kelompok lain.

Bahkan dalam beberapa situasi, keluarganya yang seharusnya menerima bantuan malah terpinggirkan karena tidak dianggap memenuhi syarat administratif. Ketiadaan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan kebutuhan dan harapan menjadikan kondisi ini tampak sebagai sesuatu yang biasa dan terus-menerus. Aspek lain yang turut berpengaruh adalah adanya stigma sosial dari lingkungan seputar. Masyarakat seringkali melihat keluarga miskin sebagai beban atau golongan yang tidak bisa maju, sehingga perlakuan terhadap mereka tanpa disadari menjadi berbeda. Label seperti "pengharapan bantuan" atau "tidak self-sufficient" membuat mereka merasa terasing dan enggan untuk bersosialisasi.

Akses ke layanan kesehatan dan sosial juga terbatas. Walaupun akses ke fasilitas kesehatan ada, banyak keluarga yang ragu untuk berobat karena tidak mampu menanggung biaya perawatan atau transportasi ke lokasi layanan

kesehatan. Kondisi ini semakin menjadikan mereka terpinggirkan, karena kesehatan yang tidak baik memengaruhi kemampuan mereka dalam bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat mereka mengalami masalah kesehatan, mereka juga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka.

Selain itu, eksklusi sosial juga diperkuat oleh perspektif atau perlakuan masyarakat yang tidak terlalu inklusif. Keluarga prasejahtera sering diabaikan, tidak diikutsertakan dalam acara sosial, dan jarang memperoleh peluang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan desa. Pandangan buruk ini membuat mereka merasakan ketidakditerimaan, bahkan di komunitas tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini yang mengakibatkan eksklusi sosial semakin mendalam dan sulit diatasi tanpa bantuan yang komprehensif dari berbagai pihak.

Saat faktor ekonomi, kebijakan yang tidak tepat, dan tekanan sosial terjadi bersamaan, eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera menjadi semakin rumit dan sulit untuk diputuskan rantai masalahnya. Sebagai dampak dari semua ini, keluarga prasejahtera tidak hanya merasakan kemiskinan secara fisik, tetapi juga merasa terpinggirkan dan tidak diakui dalam masyarakat, meskipun mereka memiliki hak yang setara sebagai warga negara.

### 3. Interpretasi Hasil Penelitian

NO	Informan	Hasil wawancara penelitian	Interpretasi
1	Mia	“Waktu itu ada peninjau datang dan menanyakan kehidupan saya dimana yang sebelumnya saya	Pernyataan itu menggambarkan salah satu bentuk eksklusi sosial yang dialami keluarga prasejahtera akibat sistem evaluasi administratif yang kaku dan kurang memperhatikan realitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

		<p>penerima bantuan tersebut. Tapi karena saya sudah menikah dengan pelaut atau <i>parrengge</i> makanya pkh saya di putuskan dan bpjs gratis pun ikut di putuskan”.</p>	<p>Dalam pernyataan tersebut, seorang warga mengungkapkan bahwa sebelumnya ia adalah penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPJS Kesehatan secara gratis. Akan tetapi, setelah bersuamikan seorang pelaut atau <i>parrengge</i>, bantuan itu dihentikan karena dianggap tidak pantas menerima bantuan berdasarkan status pernikahannya. Di sini tampak bahwa keputusan untuk menghentikan bantuan hanya didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan suami (sebagai pelaut) dianggap memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, jika dianalisis lebih mendalam, menjadi istri pelaut tidak otomatis menjamin keberuntungan. Banyak nelayan lokal atau tradisional yang beroperasi secara tidak tetap, tanpa gaji bulanan yang jelas, dan pendapatannya sangat dipengaruhi oleh hasil laut, musim, dan keberuntungan. Dengan kata lain, meskipun suaminya seorang pelaut, situasi ekonomi keluarga bisa saja tetap rentan atau bahkan masih dalam kategori prasejahtera.</p>
2	Sat	<p>“saya dari di pak desa melapor karena tiba-tiba diputuskan BLTKu padahal <i>matayya</i> melihat kalau saya ini kurang mampu ndada kebunku apalgi sawahku yang ada hanya rumah itu rumahku tidak bagus orang lain bisa dibilang rumahku hanya untuk tempat berteduh saja karena keotmi vasilitas juga</p>	<p>Warga itu merasa sangat frustrasi karena bantuan BLT-nya mendadak dihentikan, meski situasi ekonominya masih sangat sulit. Ia tidak mempunyai kebun atau ladang, hanya tinggal di rumah sederhana yang bahkan hanya cukup untuk berlindung, dengan fasilitas yang sangat sedikit. Ia tidak dapat bekerja seperti memotong padi akibat keterbatasan fisik, dan selama ini hanya bisa bertahan hidup berkat bantuan anaknya. Ia juga menunjukkan kartu penerima bantuan sebagai bukti dan mempertanyakan mengapa bantuan dihentikan, padahal keadaan hidupnya sangat jelas menunjukkan ketidakmampuan. Bagi dia,</p>

		<p>seadanyan. Seandainya ndada anakku lain sering kasihka uang nda tau bagaimanami kehidupanku karena saya tidak bisama ikut potong padi di orang-orang. Ini kartuku kalau tidak di kasih terima betulanma BLT <i>kupotongmi</i> krn apa gunanya di simpan kalau tidak di ksh terimama na jelas-jelas mata melihat bemana kehidupanku saya <i>kodong</i>”.</p>	<p>Menyimpan kartu tanpa mendapatkan bantuan dianggap sia- sia. Seorang warga mengeluhkan keputusan BLT secara tiba-tiba meski kondisinya masih sangat miskin, tidak memiliki kebun atau sawah, hanya tinggal di rumah sederhana dengan fasilitas seadanya, tidak mampu bekerja, dan hanya bertahan hidup dari bantuan anaknya. Ia mempertanyakan kenapa bantuan dihentikan padahal kondisinya jelas masih layak menerima.</p>
3	Anis	<p>Keterbatasan ekonomi membuat warga kurang mampu merasa enggan ikut kegiatan desa karena tidak sanggup membayar iuran atau merasa minder, sehingga perlahan menjadi terpinggirkan dari lingkungan sosial.</p>	<p>Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kekurangan finansial membuat seseorang merasa terasing dalam interaksi sosial di masyarakat. Saat tidak dapat membayar iuran atau sumbangan, bahkan hanya karena merasa tidak percaya diri dengan penampilan, orang menjadi enggan berpartisipasi dalam kegiatan desa. Bukan karena tidak mau, melainkan karena merasa tidak layak atau takut dihakimi. Sebagai akibatnya, mereka perlahan-lahan terbiasa sendiri dan pada akhirnya tidak ikut serta dalam aktivitas bersama, sehingga eksklusi sosial terjadi secara bertahap.</p>
4	Fate	<p>Tidak selalu begitu. Ada suatu ketika terdapat bantuan pangan dan juga distribusi bibit pertanian, tetapi kami tidak menerima. Dia bilang karena kami tidak tercatat.</p>	<p>Warga merasa frustrasi karena tidak mendapatkan dukungan meskipun menghadapi kesulitan. Saya menyaksikan bahwa terdapat individu yang lebih mampu justru menerima bantuan. Saya memperkirakan ini disebabkan oleh jarak rumahnya dari pusat desa atau karena kurangnya hubungan dengan</p>

		<p>Namun saya menyaksikan sendiri, ada yang lebih mampu justru terdaftar. Terkadang saya merasa bingung, apakah ini disebabkan karena kami tinggal jauh dari pusat desa, atau karena tidak mengenal orang di dalam? Terasa seolah kami tidak dianggap pantas untuk mendapatkan bantuan, meskipun kami jelas-jelas hidup dalam kesulitan.</p>	<p>pihak berwenang. Kondisi ini membuatnya merasa diabaikan dan semakin tersisih.</p>
5	Ansar	<p>ada pembagian bibit cocoa tpi tidak na informasikan kepada seluruh masyarkat bilang kasih masuk data kebunta supaya bisaki dapat. Iyaro, tau makawe edemi missengi. Nappa aro tau mattarimae maegangngi pada iyanatommi kero di kanotoro ede nappa engka 50 pong tania pato arodo. Nasengsi tau iyaro gare kokota tania di padang, naidi lokasina kokota bontoraja malai”.</p>	<p>Warga merasa tidak diberi informasi soal pembagian bibit kakao dan baru tahu setelah prosesnya berjalan. Hanya yang sudah didata kebunnya yang dapat bantuan, padahal sebagian penerima justru bukan dari wilayah setempat. Hal ini menimbulkan kekecewaan karena bantuan tidak merata dan tidak transparan.</p>

6	Ukkas	<p>Seorang warga menyatakan bahwa sebelumnya ia dapat bekerja serabutan dan terlibat dalam kegiatan masyarakat, namun setelah sakit, fisiknya melemah dan tidak lagi mampu bekerja atau berpartisipasi dalam aktivitas desa. Karena keadaan fisiknya, ia jarang datang ke acara desa dan mulai merasakan dijauhi. Bantuan yang sebelumnya diterima sekarang sudah tidak ada lagi, dan tidak ada yang memberitahukan atau peduli. Ia merasa berduka karena bukan hanya kehilangan kekuatan, tetapi juga merasakan diabaikan dan tidak dihargai lagi oleh orang-orang di sekelilingnya</p>	<p>Warga ini sebelumnya aktif bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan desa, namun setelah jatuh sakit, fisiknya melemah sehingga ia tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Karena jarang muncul, ia merasa mulai dijauhkan dan tidak lagi diperhatikan. Dukungan yang biasanya ia terima juga terhenti tanpa penjelasan. Kondisi ini membuatnya merasa sedih, sebab selain kehilangan kekuatan fisik, ia juga merasakan diabaikan dan tidak dihormati oleh orang-orang di sekitarnya.</p>
---	-------	--	--



7	Fajri	<p>ini pembagian perlengkapan <i>sekolayya</i> di kasih terimaka karena saya termasuk orang kurang mampu ka meninggalmi bapakku mamaku mami sebagai tulang punggung keluarga na kakakku sudahmi menikah untung kalau ada rezekinya lebih biasa tongja na kasiah <i>kodong</i>. Baru yang terima begini 2 orng ja di palimassang terbagi dan bergiliran bede mendapat na saya ini baruma lgi dapat”</p>	<p>Individu ini mendapatkan bantuan alat sekolah karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ayah dan ibunya telah meninggal dunia, dan sekarang ia hanya bergantung pada kakaknya yang telah berkeluarga. Bantuan itu diberikan secara bergiliran, dan ia baru menerimanya kali ini setelah menunggu.</p>
8	Mir	<p>ini pembagian perlegkapan sekolah sebelumnya itu di infokan kesemua dusun bahwa cari dan data warga yang bersekolah yang perlengkapan sekolahnya itu kurng bagus di pakai apalagi anak yang single parent.</p>	<p>Sebelum pembagian perlengkapan sekolah, seluruh dusun diinformasikan untuk mendata anak sekolah yang perlengkapannya kurang layak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu atau single parent, agar bantuan tepat sasaran</p>
9	War	<p>Kami tinggal sedikit jauh dari pusat desa, di ujung bagian. Hunian kami kecil dan terpencil dari jalan utama. Oleh sebab itu, jarang ada orang yang berkunjung atau hanya menyapa. Data mengenai kegiatan desa juga sering kami terima dengan keterlambatan. Maka kami kerap merasakan ketertinggalan,</p>	<p>Karena berada di tempat yang terpencil dan jauh dari pusat desa, penduduk jarang menerima informasi secara cepat. Akibatnya, mereka kerap tertinggal dalam aktivitas desa dan merasakan keterasingan, seolah hidup sendiri meskipun masih berada dalam satu daerah.</p>



		tidak mengetahui apa yang terjadi. Bergabung pun terasa kurang nyaman, karena sudah terlambat mengetahui. Itu yang membuat kami semakin merasa terasing, seolah-olah hidup sendiri di lokasi yang sama.	
10.	Raba	<p>“biasa to mangali’ngaliki ikut hadir di pertemuan warga, karena takutki dianggap hanya datang saat ada bantuan.”</p> <p>"Kami sebenarnya juga ingin terlibat."</p>	Warga merasa ragu untuk ikut pertemuan karena khawatir dianggap hanya datang saat ada bantuan. Padahal sebenarnya mereka ingin ikut terlibat dalam kegiatan desa, bukan semata-mata karena bantuan.
11.	Wati	<p>“itu saya kodong karna nda di kasima bantuan PKH dan semacamnya jadi saya biasa pergi menanam dan potong padi karena ndadami juga suamiku yang mau hidupika.na itu biasa hasil begituku ku putar jadi modal usaha wattuna bulan puasa kodong untuk di pke belanja hari-hari hasilnya itupun biasa nda cukup kasian”</p>	Individu ini tidak menerima bantuan PKH atau bantuan sejenis lainnya, sehingga ia harus berusaha sendiri dengan menanam dan memanen padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suaminya tidak mendukung biaya hidup. Pendapatan dari jerih payahnya dijadikan modal usaha kecil di bulan puasa, tetapi hasil yang didapat sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menjalani kehidupannya dengan banyak tantangan dan batasan.
12.	Fira	<p>“karena saya ini tidak punya ijazah SMA makanya saya kerja di kota sebagai pelayan warung untuk menghidupi kebutuhan anakku dengan sendiri tanpa ada suami. Itupun biasa kodong nda cukup jdi biasa tongma itu na bantu orang tua belanjai</p>	Karena tidak memiliki sertifikat pendidikan menengah, wanita ini hanya dapat bekerja sebagai pelayan restoran di kota untuk menghidupi anaknya seorang diri tanpa suami. Pendapatannya sering kali kurang, sehingga orang tuanya terkadang harus membantu membeli kebutuhan untuk cucunya. Ia percaya bahwa dirinya merupakan orang yang pantas mendapatkan bantuan, tetapi hingga saat ini belum pernah mendapatkan dukungan

		<i>cucunya. Na yang seharusnya itu seperti sayami ini di kasih bantuan tapi nyatanya ndadaji pernah saya terima dari pemerintah”.</i>	apa pun dari pemerintah.
--	--	---	--------------------------

13	Maryam	<i>“Saya berharap anak-anak bisa mendapatkan pendidikan tinggi, tetapi kami tidak memiliki dana.” "Walaupun sakit, kami kadang lebih memilih untuk menunggu sembuh sendiri karena takut biaya rumah sakit."</i>	Orang tua ini ingin anak-anaknya sekolah tinggi, tapi kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Untuk kesehatan pun, mereka sering menahan diri berobat karena takut tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Ini menunjukkan betapa keterbatasan ekonomi memaksa mereka mengorbankan pendidikan dan kesehatan.
14	Herul	Saya hanya menyelesaikan SD, dan karena itu saya sangat kesulitan mencari pekerjaan yang pantas. Saat terdapat peluang atau pelatihan, umumnya persyaratannya minimal adalah lulusan SMA.	Karena hanya lulusan SD, ia merasa sulit mendapatkan pekerjaan atau ikut pelatihan yang biasanya mensyaratkan minimal lulusan SMA. Meskipun punya semangat dan keinginan untuk maju, ia tetap terpinggirkan karena tidak punya ijazah. Ia merasa pendidikan menjadi penghalang besar bagi orang seperti untuk berkembang dan diakui dalam masyarakat.

		<p>Walaupun saya ingin belajar dan berkembang, namun karena tidak memiliki ijazah, saya selalu terpinggirkan. Kami yang tidak berpendidikan tinggi ini sepertinya dianggap tidak mampu berkontribusi, padahal kami juga memiliki motivasi dan kemauan. Terkadang saya merasakan, pendidikan itu seperti dinding besar yang menghalangi kami untuk berkembang.</p>	
15	RT	<p>"Ada tongmo itu biang, kalau keluarga kurang mampu ikut rapat, pasti mintaji bantuan lagi.</p>	<p>Pernyataan semacam ini mencerminkan stigma yang sering disematkan pada keluarga prasejahtera. Kehadiran mereka di forum desa atau rapat warga sering dianggap negatif, seolah-olah hanya hadir untuk menanti bantuan. Sebenarnya, banyak di antara mereka datang dengan niat yang tulus untuk terlibat, memberikan kontribusi, dan menjadi bagian dari komunitas. Stigma semacam ini bukan hanya menyakiti perasaan, tetapi juga memperdalam jarak sosial antara kelompok yang mampu dan yang tidak mampu. Sebagai akibatnya, banyak keluarga prasejahtera merasa enggan untuk hadir dalam pertemuan atau kegiatan desa karena khawatir dipandang sebelah mata atau dianggap tidak layak. Seiring berjalannya waktu, ini menimbulkan ruang keterasingan dan eksklusi sosial yang semakin meluas, di mana kelompok yang</p>

			<p>seharusnya memperoleh dukungan malah semakin merasa terpinggirkan. Ucapan itu seharusnya mencerminkan bahwa masih terdapat pola pikir yang perlu diperbaiki dalam masyarakat. Seluruh individu, tanpa memandang status ekonomi, memiliki hak untuk hadir, didengarkan, dan dihargai. Partisipasi mereka dalam aktivitas desa bukan sekadar hak, tetapi juga merupakan wujud perhatian terhadap lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, alih-alih curiga terhadap niat mereka, kita seharusnya membangun lingkungan yang bersahabat, inklusif, dan penuh penghargaan.</p>
16	San	<p><i>"waktuku itu kasian mau kasih sekolah anakku di sekolah unggulan di kota, ditanyakan adaji dekkengnukah"</i></p>	<p>mencerminkan realitas sosial yang kerap dirasakan oleh masyarakat kurang mampu saat ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Keinginan seorang orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan di kota, terhambat bukan hanya oleh persoalan biaya, tapi juga oleh sistem sosial yang tidak sepenuhnya terbuka. Pertanyaan seperti <i>"adaji dekkengnukah"</i> (apakah kamu punya orang dalam atau koneksi) menggambarkan bahwa akses ke pendidikan yang baik sering kali tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau potensi anak, tetapi juga oleh siapa yang dikenal. Situasi ini mencerminkan ketimpangan dalam sistem pendidikan, di mana harapan orang tua untuk masa depan anak bisa terganjal oleh faktor relasi sosial atau ketidakterjangkauan fasilitas. Di balik kalimat sederhana itu, tersimpan rasa kecewa dan ketidakberdayaan, karena meskipun punya niat dan</p>

			semangat, mereka tetap menghadapi tembok tak terlihat yang membatasi langkah. Harapan untuk mobilitas sosial melalui pendidikan akhirnya menjadi sulit dicapai, dan ini memperkuat siklus ketimpangan yang diwariskan antargenerasi. Narasi ini bukan sekadar curahan hati, tapi sebuah cermin dari masih adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak dasar, seperti pendidikan, yang seharusnya terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial atau koneksi pribadi.
17	Rahma	"Anakku pernah tidak diikutsertakan lomba di sekolah karena dianggap tidak mampu membeli seragam khusus seperti yang lain." Saya sangat merasa pilu, sebab seharusnya semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. "Tapi terkadang, jika orang tua tidak memiliki uang, anaknya juga akan terpinggirkan.	Pernyataan ini menunjukkan bagaimana keterbatasan ekonomi orang tua secara langsung berdampak pada kesempatan anak untuk berpartisipasi di sekolah. Ketika seorang anak tidak diikutsertakan dalam lomba hanya karena tidak mampu membeli seragam khusus, itu menciptakan rasa ketidakadilan dan menyakitkan bagi orang tua. Seharusnya, sekolah menjadi ruang yang inklusif dan adil bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Namun kenyataannya, kemiskinan membuat anak-anak dari keluarga kurang mampu terpinggirkan secara tidak langsung, sehingga hak mereka untuk berkembang dan merasa setara pun ikut terabaikan.

#### 4. Cara Kerja Teori Dahrendorf Mengenai Eksklusi Sosial Terhadap Anggota Keluarga Prasejahtera

Teori konflik Ralf Dahrendorf sangat berguna untuk memahami fenomena eksklusi sosial yang dialami oleh keluarga kurang mampu. Menurut Dahrendorf, masyarakat senantiasa berada dalam situasi konflik akibat adanya ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan otoritas. Ia mengelompokkan masyarakat menjadi dua kategori utama, yakni kelompok yang memegang otoritas dan kelompok yang tidak memegang otoritas. Ketidaksetaraan ini menghasilkan hubungan sosial yang tidak seimbang, di mana kelompok yang dominan cenderung menguasai sumber daya dan proses pengambilan keputusan, sedangkan kelompok yang lemah tidak memperoleh cukup kesempatan untuk mengekspresikan kepentingannya.

Dalam konteks pengucilan sosial terhadap keluarga prasejahtera, posisi mereka terletak di kelompok yang tidak memiliki otoritas. Mereka sering kali tidak mendapat akses atau keterlibatan langsung dalam forum pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun dalam sistem layanan sosial yang ada. Sebagai contoh, dalam proses pencatatan penerima bantuan atau saat mendistribusikan program sosial, suara mereka sering tidak didengar atau bahkan diabaikan. Saat akses ke bantuan ditentukan oleh hubungan sosial, kekuasaan, atau posisi dalam struktur masyarakat, maka keluarga prasejahtera semakin teralienasi secara sistematis. Lebih lanjut,

Dahrendorf menegaskan bahwa konflik sosial semacam ini tidak bisa dihindari karena struktur sosial memang cenderung menghasilkan ketidaksetaraan. Eksklusi sosial yang dialami oleh keluarga prasejahtera bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga akibat ketidakberdayaan dalam struktur sosial. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara bersama, sehingga ketidakadilan terus berulang dan diteruskan ke generasi berikutnya. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga struktural dan simbolik, yang menghalangi mobilitas sosial mereka.

Dengan demikian, teori Dahrendorf membantu kita melihat bahwa eksklusi sosial bukan hanya berkaitan dengan individu yang tidak mampu, tetapi mengenai cara kerja sistem sosial dan siapa yang memiliki kekuasaan di



dalamnya. Dalam rangka mengatasi masalah eksklusi sosial bagi keluarga prasejahtera, diperlukan perubahan struktural yang memungkinkan partisipasi lebih luas, menghilangkan praktik diskriminatif, serta mendorong distribusi sumber daya yang lebih adil. Jika tidak, maka eksklusi sosial akan tetap menjadi gambaran dari ketidaksetaraan yang tersembunyi tetapi nyata di masyarakat.

Kondisi seperti ini juga menunjukkan bahwa eksklusi sosial tidak muncul secara mendadak, melainkan merupakan hasil dari proses yang berkepanjangan dan berjenjang. Saat keluarga prasejahtera tidak mendapatkan akses ke pendidikan tinggi, pekerjaan yang baik, atau jaringan sosial yang kuat, mereka akan menghadapi kesulitan untuk menembus struktur sosial yang sudah ada. Dalam banyak situasi, mereka bahkan tidak menyadari cara untuk memperoleh haknya sendiri akibat keterbatasan informasi dan kurangnya keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan atau pencatatan program sosial. Di sinilah teori Dahrendorf mendapatkan momentumnya, bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi dalam kelompok tertentu cenderung mempertahankan status quo dan menjaga posisi dominannya.

Dinamika ini menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga melibatkan hubungan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya sosial serta politik. Keluarga prasejahtera sering kali terjebak dalam keadaan di mana mereka dianggap tidak cukup berharga untuk didengarkan. Saat mereka mencoba menyampaikan aspirasi, sering kali diabaikan atau dianggap sekadar sebagai kelompok penerima manfaat pasif,



bukan sebagai bagian dari masyarakat yang berhak untuk berpartisipasi secara aktif. Ini menghasilkan efek psikologis yang mendalam: rasa tidak dihargai, diabaikan, dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem sosial yang seharusnya melindungi mereka.

Keadaan ini semakin buruk karena timbulnya stigma sosial terhadap keluarga yang kurang mampu. Mereka sering dianggap malas, tergantung pada dukungan, atau hanya hadir saat ada distribusi program. Sebenarnya, banyak di antara mereka yang memiliki motivasi kerja dan keinginan untuk mandiri, namun sistem sosial tidak menyediakan ruang atau dukungan yang memadai. Teori Dahrendorf mengungkapkan bahwa konflik tidak hanya terjadi secara terbuka, tetapi juga dapat muncul secara tersembunyi melalui sistem sosial yang tidak adil, seperti pengucilan, pembiaran, dan ketidaksetaraan perlakuan.

Dalam konteks ini, eksklusi sosial seharusnya tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi dari kemiskinan, melainkan sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak seimbang dalam distribusi kekuasaan dan akses. Sehubungan dengan itu, penanggulangan eksklusi sosial tidak hanya cukup dengan memberikan bantuan material, tetapi juga harus membangun sistem yang lebih inklusif. Artinya melibatkan keluarga prasejahtera dalam keputusan, memberikan informasi yang sesuai, dan menghapus batasan sosial yang menghalangi mereka untuk maju.

Dengan kata lain, usaha untuk mengatasi eksklusi sosial memerlukan pendekatan yang bersifat struktural, bukan sekadar pendekatan amal. Pemerintah desa, lembaga sosial, dan masyarakat harus memandang keluarga

prasejahtera bukan sebagai beban, melainkan sebagai elemen penting dalam komunitas yang memiliki kemampuan untuk berkembang. Saat ruang partisipasi terbuka dan kekuasaan tidak lagi dikuasai oleh kelompok tertentu, maka harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara dapat terwujud.

#### 4. Posisi Penelitian

Studi sebelumnya tentang eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera biasanya berfokus pada elemen-elemen struktural seperti ketidakadilan ekonomi, rendahnya jenjang pendidikan, dan kesulitan dalam mengakses layanan dasar. Dalam sejumlah penelitian sebelumnya, pengucilan sosial sering kali dianggap sebagai akibat langsung dari kemiskinan materi. Saat keluarga kekurangan sumber daya ekonomi, mereka secara otomatis tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Pendekatan ini lebih berfokus pada penggunaan data statistik dan indikator makro untuk menggambarkan marginalisasi kelompok miskin dalam sistem sosial.

Akan tetapi, studi saat ini cenderung berfokus pada pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi manusia. Pendekatan yang baru tidak hanya memandang eksklusi sosial dalam konteks ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan psikologis yang menyertainya. Contohnya, pengalaman merasa malu ketika menghadiri pertemuan desa akibat ketidakmampuan membayar iuran, atau perasaan terasing karena tidak memiliki “orang dalam” saat mengurus bantuan, merupakan bagian dari

dimensi eksklusi sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Hal ini menunjukkan bahwa pengucilan sosial juga berpengaruh pada aspek emosional, harga diri, dan hubungan sosial di dalam komunitas.

Selanjutnya, penelitian terkini lebih menekankan metode partisipatif dan berfokus pada suara masyarakat. Dengan menelusuri cerita dan pengalaman langsung dari keluarga prasejahtera, kita bisa menyadari bahwa eksklusi sosial bukan hanya soal menolak bantuan, tetapi juga soal tidak terlibat, tidak dilibatkan, bahkan tidak dipandang. Keterlambatan informasi, pengabaian dalam pendataan bantuan, serta anggapan bahwa keluarga miskin hanya muncul saat pembagian bantuan semua ini membentuk realitas sosial yang memposisikan keluarga prasejahtera dalam keadaan pasif dan tidak berdaya. Penafsiran ini mengindikasikan bahwa pengucilan sosial memiliki sifat sistemik dan multidimensi. Tidak hanya terkait dengan kemiskinan, tetapi juga terkait erat dengan kekuasaan, status sosial, serta struktur sosial yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, studi ini berusaha mengungkap struktur yang menyebabkan kelompok miskin tetap terpinggirkan, serta menciptakan ruang untuk diskusi bahwa pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan bantuan ekonomi, tetapi juga dengan pengakuan, keterlibatan, dan pemulihan martabat sosial.

Dengan mempertimbangkan dimensi ini, pendekatan kebijakan juga harus beradaptasi. Pemerintah desa dan lembaga sosial sebaiknya tidak hanya menilai kemiskinan dari segi materi, tetapi juga mengenali siapa saja yang secara sosial tidak memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpartisipasi,

dan memperoleh hak yang setara. Dalam konteks ini, pengucilan sosial tidak hanya bisa diatasi dengan bantuan sementara, tetapi memerlukan perubahan pada struktur sosial dan rel.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga prasejahtera mengalami eksklusi sosial dalam berbagai aspek yang saling terkait dan memperburuk kondisi kemiskinan yang mereka hadapi. Secara spesifik, hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keluarga prasejahtera menghadapi pengecualian ekonomi, yang ditunjukkan oleh kurangnya akses kepada pekerjaan yang baik dan penghasilan yang memadai. Mereka biasanya beroperasi di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera terjadi dalam berbagai bentuk saling terkait, seperti eksklusi ekonomi (minimnya pekerjaan dan pendapatan layak), eksklusi institusional (akses terbatas terhadap layanan publik), serta eksklusi sosial dan politik (stigma, diskriminasi, dan keterpinggiran dalam pengambilan keputusan). Keluarga prasejahtera mengalami stigma dan diskriminasi. Mereka sering dianggap buruk oleh masyarakat sekitar, dipersepsikan sebagai pemalas atau hanya mengandalkan bantuan. Pandangan ini membuat mereka merasa rendah diri, malu, dan menjauh dari interaksi sosial.

2. Faktor utama penyebab eksklusi ini mencakup struktur sosial dan birokrasi yang tidak inklusif, rendahnya akses informasi, pandangan negatif masyarakat, serta tidak adanya ruang partisipasi politik bagi keluarga prasejahtera, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan dan keterasingan sosial.

Dengan demikian, pengucilan sosial terhadap keluarga prasejahtera bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga masalah struktural dan kultural. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penanganan yang menyeluruh, mencakup perbaikan sistem layanan publik, penghapusan label sosial, dan keterlibatan aktif keluarga prasejahtera dalam aktivitas sosial serta politik di komunitas mereka.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan, saran yang bisa disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1) Untuk Pihak Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

Diperlukan kebijakan yang lebih terbuka dan mendukung keluarga prasejahtera, khususnya dalam hal mempermudah akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintah. Pemerintah juga harus memperkuat program pemberdayaan ekonomi dengan pelatihan kerja dan menciptakan lapangan kerja lokal yang sesuai dengan keterampilan masyarakat.

#### **2) Untuk Lembaga Sosial dan Komunitas Sipil**

Perlu diadakan program pendidikan bagi masyarakat untuk mengurangi stigma buruk terhadap keluarga prasejahtera. Lembaga sosial dapat berkontribusi secara proaktif dalam menciptakan kesadaran bersama bahwa kemiskinan merupakan isu struktural yang perlu diatasi secara kolektif, bukan dijadikan alasan untuk mendiskriminasi.

#### **3) Untuk Instansi Pendidikan dan Pengajar**

Diharapkan pihak sekolah dan pengajar lebih sensitif terhadap keadaan sosial ekonomi siswa. Perlakuan adil dan dukungan emosional

sangat krusial agar anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak merasa terasing atau merasa malu dengan keadaan keluarganya.

4) Untuk Keluarga yang Sejahtera

Diharapkan keluarga prasejahtera dapat terus berupaya untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial masyarakat dan berani mengekspresikan hak-haknya. Mengambil informasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan atau solusi akan sangat berguna untuk mengurangi keterbelakangan.

5) Untuk Peneliti Berikutnya

Studi ini masih terfokus pada jenis-jenis eksklusi sosial di tingkat lokal. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk menyelidiki lebih dalam hubungan antara eksklusi sosial dan elemen kebijakan nasional, serta memperluas area penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasi dengan lebih baik





## DAFTAR PUSTAKA

- Alhamid, Thalha; Anufia, Budur. (2019). Instrumen Pengumpulan Data. 1–20
- Atkinson, A.B. (1998). “Social Exclusion, Poverty And Unemployment”. *Journal Of Economic, Inequality*, 1 (1), 35-45.
- A, R. (2011). Eksklusi Hak-Hak Sipil Dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan. *Universitas Indonesia*, 6, 10–61.  
[https://www.academia.edu/download/34996411/Skripsi\\_Arman\\_Riyansyah.pdf](https://www.academia.edu/download/34996411/Skripsi_Arman_Riyansyah.pdf)
- Agustina, D., Kunci, K., Agama, :, Alienasi, D., & Marx, K. (2022). *Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies. Agama Dan Ekonomi: Kemiskinan Di Indonesia Dalam Perspektif Karl Marx Tentang Agama Sebagai Alieanasi the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) lience* ([http://creat. 2\(2\), 2809–221](http://creat.2(2), 2809–221).  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>
- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409–426.
- Bagi, P., & Miskin, K. (2020). *Vol. 1, No. 2, Desember 2020. 1(2)*, 1–26.
- Ii, B. A. B., & Teori, A. K. (1920). *Hotman M. Siahnan. Sejarah dan Teori Sosiologi.*( Jakarta, Erlangga,1989),90.
- Jamilah, J., & Fitri, H. H. (2023). Eksklusi Sosial Pada Masyarakat Pesisir Sebagai Dampak Pembangunan Pariwisata Tanjung Lesung Pandeglang Banten. *Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI*, 1(2), 179–186.

www.pkns.portalapssi.id

Lestari, A., Sumardjoko, B., Dessty, A., Rahmawati, L. E., & Fauziati, E. (2022).

Kontribusi Perilaku Disruptif Terhadap Eksklusi Sosial Pada Anak Usia Sd.

*Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11(3), 880.

<https://doi.org/10.33578/jpfkip.v11i3.8950>

Maulana, G. (2023). Eksklusi Sosial Dalam Akses Terhadap Pendidikan: Tinjauan

Dari Perspektif Keadilan. *Ilmu Sosial Dan Politik*, 1–11.

Nurdin, M. F. (2015). Eksklusi Sosial Dan Pembangunan. *Journal of Chemical*

*Information and Modeling*, 53(November), 1689–1699.

Oruh, S., Kamaruddin, S. A., Agustang, A., Makassar, U. N., Pejuang, U., &

Indonesia, R. (2022). *Pola Relasi Patron Klien Panrita Lopi Di Desa*. 11(3).

Ramdass, R. (2010). Managerial communication - The key to continuous

engagement and competitive advantage. *Proceedings European Aviation*

*Safety Seminar, EASS*, 08(03), 585–597.

Rinaldi, M. B. (2020). *Analisis Pendidikan Inklusif pada Penyandang Disabilitas*

*di Perguruan Tinggi Negeri ( Studi Kasus : Pendidikan Inklusif di UIN Sunan*

*Kalijaga Yogyakarta )*. November, 1–23.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23768.52481>

Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data

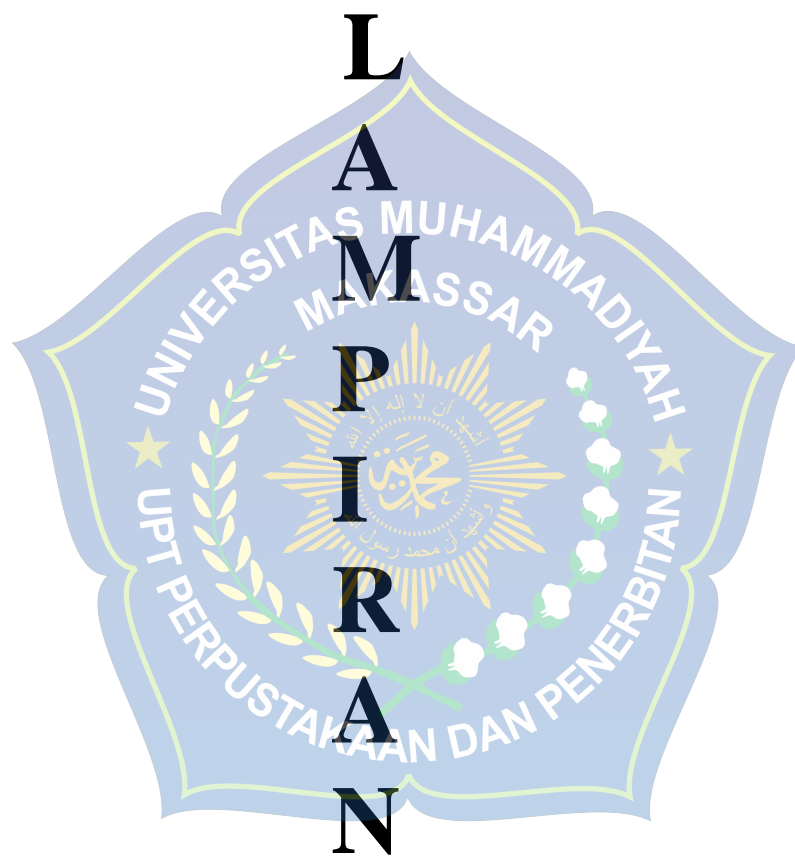
Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*,

15(2), 79–91.

Sulaeman, M. M., Mauludin, A., Sulistyati, M., Nurlina, L., Yunasaf, U., Alim, S.,

& Pengajar, S. (2019). The Impact of Social Exclusion and The Farmer





### PEDOMAN PENELITIAN OBSERVASI

**Nama : Nurwandayani**

**Nim 105381100121**

**Judul Penelitian : Eksklusi Sosial Terhadap Keluarga Prasejahtera (Studi Kasus: Desa Padang Kabupaten Bulukumba)**

Rumusan masalah	Indikator	Sub indikator	Pernyataan	Y	T	Ket
1. Bagaimana bentuk eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba?	Kemiskinan	Situasi yang miskin mempunyai tanda rumah yang teot dan terbuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah dan perlengkapannya rumah yang minim	Terkendala pada kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan pendapatan yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terbilang rendah			
	Fisik yang lemah	Kelemahan fisik yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak adanya seorang laki-laki laki sehat yang menjadi kepala keluarga atau disebut sebagai perempuan rawan sosial ekonomi	Perempuan yang menjadi kepala keluarga yang berperan sebagai ibu dalam mengurus rumah tangga sekaligus berperan sebagai seorang ayang yang mencari nafkah keluarga			

	Keterasingan/ marginalisasi	Kelompok miskin dapat terasingkan/termarginalisasi karena letak tempat tinggal terisolasi secara geografis sehingga minim mendapatkan akses sumber-sumber informasi	Kurangnya pemerintah untuk mensurvei keadaan masyarakat desa terpencil			
	Kerentanan	Masyarakat miskin rentan untuk menjadi sangat miskin bila dihadapkan pada situasi sulit seperti bencana alam dan musibah lainnya.	Tentu memutar otak untuk menutupi kebutuhan hidup dengan menjual barang-barang yang biasa dijual			
	Ketidakberdayaan	Masyarakat miskin cenderung tidak memiliki daya untuk keluar dari	Adanya factor yang tidak mau berusaha			

		kondisi kemiskinan yang sedang dialami			
2. Apa factor-faktor penyebab terjadinya eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba?	Kemiskinan	Kemiskinan dapat menyebabkan eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera	Gambaran keluarga prasejahtera yang hidup di rumah kumuh dengan kondisi dengan kondisi yang tidak seimbang.		
	Stigma social	Stigma social dapat memperburuk eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera	Gambaran orang-orang yang menolak bergabung dengan keluarga prasejahtera karena stigma social/sombong tapi miskin		
	Keterbatasan akses	Keterbatasan akses pendidikan dapat memperburuk eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera	Gambaran anak-anak prasejahtera yang tidak dapat bersekolah karena keterbatasan akses pendidikan.		
	Diskriminasi	Diskriminasi dapat memperburuk eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera	Terdiskriminasi karena status social ekonomi		



### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN (QUESTIONNAIRE)

**Nama** : Nurwandayani

**Nim** : 105381101720

**Judul Penelitian** : Eksklusi Sosial Terhadap Keluarga Prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba

Rumusan masalah	Indikator	Sub Indikator	Item pertanyaan
1. Bagaimana bentuk eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba?	Kemiskinan	Situasi yang miskin mempunyai tanda rumah yang teot dan terbuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah dan perlengkapan rumah yang minim	<p>1. Menurut pendapat Bapak Ibu apakah krluarga prasejahtera yang tinggal di rumah di teot dan terbuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah lebih rentang mengalami eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera di desa padang kabupaten bulukumba?</p> <p>2. Menurut pendapat Bapak Ibu apakah ada perbedaan dalam masyarakat sekitar memandang keluarga prasejahtera yang tinggal di rumah yang lebih baik dan yang tinggal di rumah yang terot?</p> <p>3. Menurut pendapat bapak/ibu bagaimana perlengkapan rumah yang minim memperngaruhi keluarga prasejahtera untuk berpartisipasi dalam kegiatan social?</p>
	Fisik yang lemah	Kelemahan fisik yang disebabkan oleh beberapa hal seperti	1. Menurut pendapat Bapak Ibu apakah ketidakadanya seorang

	tidak adanya seorang laki-laki sehat yang menjadi kepala keluarga atau disebut sebagai perempuan rawan sosial ekonomi	<p>laki-laki yang sehat sebagai kepala keluarga dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi keluarga prasejahtera?</p> <p>2. Menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana perempuan rawan sosial ekonomi dapat mempengaruhi kualitas hidup anggota prasejahtera?</p> <p>3. Menurut pendapat Bapak Ibu apakah ada perbedaan dalam masyarakat sekitar memandang keluarga prasejahtera yang memiliki kepala keluarga dengan kelemahan fisik?</p>
Keterasingan/marginalisasi	Kelompok miskin dapat terasingkan/marginalisasi karena letak tempat tinggal terisolasi secara geografis sehingga minim mendapatkan akses sumber-sumber informasi	<p>1. Menurut pendapat Bapak Ibu apakah letak tempat tinggal yang termarginalisasikan secara geografis dapat membatasi akses kelompok prasejahtera terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan?</p> <p>2. Bagaimana menurut pendapat bapak ibu tentang bagaimana dapat dilakukan perbaikan terhadap program-program pemerintah yang ada untuk mengurangi eksklusivitas sosial terhadap keluarga</p>

			prasejahtera yang tinggal di daerah terisolasi?
	Kerentangan	Masyarakat miskin rentan untuk menjadi sangat miskin bila dihadapkan pada situasi sulit seperti bencana alam dan musibah lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut pendapat Bapak Ibu apakah bencana alam dapat memperburuk kondisi kemiskinan keluarga prasejahtera?</li> <li>2. Menurut pendapat bapak ibu apakah program-program pemerintah yang ada saat ini efektif dalam mengurangi eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera dalam situasi sulit?</li> </ol>
	Ketidakberdayaan	Masyarakat miskin cenderung tidak memiliki daya untuk keluar dari kondisi kemiskinan yang sedang dialami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut pendapat Bapak Ibu apakah kelompok masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk keluar dari kondisi kemiskinan?</li> </ol>
2. Apa factor-faktor penyebab terjadinya eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera di Desa Padang Kabupaten Bulukumba?	Stigma social	Stigma social dapat memperburuk eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut pendapat Bapak Ibu apakah sebesar apa dampak stigma sosial terhadap dampak social keluarga prasejahtera?</li> <li>2. Menurut pendapat Bapak Ibu apakah stigma social dapat membatasi akses keluarga prasejahtera terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan?</li> </ol>

	Keterbatasan akses	Keterbatasan akses pendidikan dapat memperburuk eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut pendapat bapak ibu apakah ada hubungan antara keterbatasan akses pendidikan dan peningkatan resiko eksklusi sosial terhadap keluarga prasejahtera?</li> <li>2. Menurut pendapat bapak ibu bagaimana dapat dilakukan perbaikan terhadap program pemerintah yang ada untuk menurangu keterbatasan akses pendidikan dan eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera?</li> </ol>
	Diskriminasi	Diskriminasi dapat memperburuk eksklusi social terhadap keluarga prasejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menurut pendapat bapak ibu bagaimana diskriminasi mempengaruhi kemampuan keluarga prasejahtera untuk berpartisipasi dalam kegiatan social?</li> </ol>

### Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	jumlah Informan
1.	Mia	Penerima bantuan PKH	1
2.	Sat	Penerima bantuan BLT	1
3.	Anis	IRT	1
4.	Fate	IRT	1
5.	Ansar	Petani	1
6.	Uks	-	1
7.	Fajri	Penerima bantuan perlengkapan sekolah	1
8.	Mirna	Aparat desa	1
9.	Warda	IRT	1
10	Wati	IRT	1
11	Fira	Pelayan Warung Makan	1
12	Maryam	IRT	1
13	Herul	-	1
14	Raba	IRT	1
15	Otto	RT	1
16	San	IRT	1
17	Rahma	IRT	1

Tabel kualitatif

No.	Informan	Hasil penelitian wawancara	Interpretasi
1.	Mia	<p>“Waktu itu ada peninjau datang dan menanyakan kehidupan saya dimana yang sebelumnya saya menerima bantuan tersebut,. Tapi karena saya sudah menikah dengan pelaut atau <i>parrengge</i> makanya PKH saya diputuskan dan BPJS gratisi sayapun ikut diputuskan.</p>	<p>Pernyataan itu menggambarkan salah satu bentuk eksklusi sosial yang dialami keluarga prasejahtera akibat sistem evaluasi administratif yang kaku dan kurang memperhatikan realitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam pernyataan tersebut, seorang warga mengungkapkan bahwa sebelumnya ia adalah penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPJS Kesehatan secara gratis. Akan tetapi, setelah bersuamikan seorang pelaut atau <i>parrengge</i>, bantuan itu dihentikan karena dianggap tidak pantas menerima bantuan berdasarkan status pernikahannya. Di sini tampak bahwa keputusan untuk menghentikan bantuan hanya didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan suami (sebagai pelaut) dianggap memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, jika dianalisis lebih mendalam, menjadi istri pelaut tidak otomatis menjamin keberuntungan. Banyak nelayan lokal atau tradisional yang beroperasi secara tidak tetap, tanpa gaji bulanan yang jelas, dan pendapatannya sangat dipengaruhi oleh hasil laut, musim, dan keberuntungan. Dengan kata lain, meskipun suaminya seorang pelaut, situasi ekonomi keluarga bisa saja tetap</p>

			rentan atau bahkan masih dalam kategori prasejahtera.
2.	Sat	<p>penerima bantuan tersebut. Tapi karena saya sudah menikah dengan pelaut atau <i>parrengge</i> makanya pkh saya di putuskan dan bpjs gratis pun ikut di putuskan". "saya dari di pak desa melapor karena tiba-tiba diputuskan BLTku padahal <i>matayya</i> melihat kalau saya ini kurang mampu ndada kebunku apalgi sawahku yang ada hanya rumah itu rumahku tidak sebagus orang lain bisa dibilang rumahku hanya untuk tempat berteduh saja karena keotmi vasilitas juga seadanyan. Seandainya ndada anakku lain sering kasihka uang nda tau bagaimanami kehidupanku karena saya tidak bisama ikut potong padi di orang-orang. Ini kartuku kalau tidak di kasih terima betulanma BLT <i>kupotongmi</i> krn apa gunanya di simpan kalau tidak di ksh terimama na jelas- jelas mata melihat bemana kehidupanku saya <i>kodong</i>".</p>	<p>Warga itu merasa sangat frustrasi karena bantuan BLT-nya mendadak dihentikan, meski situasi ekonominya masih sangat sulit. Ia tidak mempunyai kebun atau ladang, hanya tinggal di rumah sederhana yang bahkan hanya cukup untuk berlindung, dengan fasilitas yang sangat sedikit. Ia tidak dapat bekerja seperti memotong padi akibat keterbatasan fisik, dan selama ini hanya bisa bertahan hidup berkat bantuan anaknya. Ia juga menunjukkan kartu penerima bantuan sebagai bukti dan mempertanyakan mengapa bantuan dihentikan, padahal keadaan hidupnya sangat jelas menunjukkan ketidakmampuan. Bagi dia menyimpan kartu tanpa mendapatkan bantuan dianggap sia-sia. Seorang warga mengeluhkan keputusan BLT secara tiba-tiba meski kondisinya masih sangat miskin, tidak memiliki kebun atau sawah, hanya tinggal di rumah sederhana dengan fasilitas seadanya, tidak mampu bekerja, dan hanya bertahan hidup dari bantuan anaknya. Ia mempertanyakan kenapa bantuan dihentikan padahal kondisinya jelas masih layak menerima.</p>
3.	Anis	Keterbatasan ekonomi membuat warga kurang mampu merasa enggan ikut kegiatan desa karena tidak sanggup membayar	Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kekurangan finansial membuat seseorang merasa terasing dalam interaksi sosial di masyarakat. Saat tidak dapat



		<p>iuran atau merasa minder, sehingga perlahan menjadi terpinggirkan dari lingkungan sosial.</p>	<p>membayar iuran atau sumbangan, bahkan hanya karena merasa tidak percaya diri dengan penampilan, orang menjadi enggan berpartisipasi dalam kegiatan desa. Bukan karena tidak mau, melainkan karena merasa tidak layak atau takut dihakimi. Sebagai akibatnya, mereka perlahan-lahan terbiasa sendiri dan pada akhirnya tidak ikut serta dalam aktivitas bersama, sehingga eksklusi sosial terjadi secara bertahap.</p>
4.	Fate	<p>Tidak selalu begitu. Ada suatu ketika terdapat bantuan pangan dan juga distribusi bibit pertanian, tetapi kami tidak menerima. Dia bilang karena kami tidak tercatat. Namun, saya menyaksikan sendiri, ada yang lebih mampu justru terdaftar. Kadang saya merasa bingung ini apakah ini disebabkan karena kami tertinggal?serasa kami seiolah serasa tidak pantas mendapatkannya.</p>	<p>Warga merasa frustrasi karena tidak mendapatkan dukungan meskipun menghadapi kesulitan. Saya menyaksikan bahwa terdapat individu yang lebih mampu justru menerima bantuan. Saya memperkirakan ini disebabkan oleh jarak rumahnya dari pusat desa atau karena kurangnya hubungan dengan mampu justru pihak berwenang. Kondisi ini terdaftar. Terkadang saya merasa bingung, apakah ini disebabkan membuatnya merasa diabaikan dan semakin tersisih.</p>
5.	Ansar	<p>ada pembagian bibit cocoa tapi tidak na informasikan kepada seluruh masyarkat bilang kasih masuk data kebunta supaya bisaki dapat. Iyaro, tau makawe edemi missengi. Nappa aro tau mattarimae maegangngi pada iyanatommi kero di kanotoro ede nappa engka</p>	<p>Warga merasa tidak diberi informasi soal pembagian bibit kakao dan baru tahu setelah prosesnya berjalan. Hanya yang sudah didata kebunnya yang dapat bantuan, padahal sebagian penerima justru bukan dari wilayah setempat. Hal ini menimbulkan kekecewaan karena bantuan tidak merata dan tidak transparan.</p>

		50 pong tania pato arodo. Nasengsi tau iyaro gare kokota tania di padang, naidi lokasina kokota bontoraja malai”.	
6.	Ukkas	<p>warga menyatakan bahwa sebelumnya ia dapat bekerja serabutan dan terlibat dalam kegiatan masyarakat, namun setelah sakit, fisiknya melemah dan tidak lagi mampu bekerja atau berpartisipasi dalam aktivitas desa. Karena keadaan fisiknya, ia jarang datang ke acara desa dan mulai merasakan dijauhi. Bantuan yang sebelumnya diterima sekarang sudah tidak ada lagi, dan tidak ada yang memberitahukan atau peduli. Ia merasa berduka karena bukan hanya kehilangan kekuatan, tetapi juga merasakan diabaikan dan tidak dihargai lagi oleh orang-orang di sekelilingnya.</p>	<p>Warga ini sebelumnya aktif bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan desa, namun setelah jatuh sakit, fisiknya melemah sehingga ia tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Karena jarang muncul, ia merasa mulai dijauhi dan tidak lagi diperhatikan. Dukungan yang biasanya ia terima juga terhenti tanpa penjelasan. Kondisi ini membuatnya merasa sedih, sebab selain kehilangan kekuatan fisik, ia juga merasakan diabaikan dan tidak dihormati oleh orang-orang di sekitarnya.</p>
7.	Fajri	<p>ini pembagian perlengkapan sekolahnya di kasih terimaka karena saya termasuk orang kurang mampu ka meninggalmi bapakku mamaku mami sebagai tulang punggung keluarga na kakakku sudahmi menikah untung kalau ada rezekinya lebih biasa tongja na kasiah kodong. Baru yang terima begini 2 orng ja</p>	<p>Individu ini mendapatkan bantuan alat sekolah karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ayah dan ibunya telah meninggal dunia, dan sekarang ia hanya bergantung pada kakaknya yang telah berkeluarga. Bantuan itu diberikan secara bergiliran, dan ia baru menerimanya kali ini setelah menunggu</p>

		di palimassang terbagi dan bergiliran bede mendapat na saya ini baruma lgi dapat”	
8.	Mirna	ini pembagian perlegkapan sekolah sebelumnya itu di infokan kesemua dusun bahwa cari dan data warga yang bersekolah yang perlengkapannya sekolahnya itu kurng bagus di pakai apalagi anak yang single parent.	Sebelum pembagian perlengkapan sekolah, seluruh dusun diinformasikan untuk mendata anak sekolah yang perlengkapannya kurang layak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu atau single parent, agar bantuan tepat sasaran
9.	Warda	Kami tinggal sedikit jauh dari pusat desa, di ujung bagian. Hunian kami kecil dan terpencil dari jalan utama. Oleh sebab itu, jarang ada orang yang berkunjung atau hanya menyapa. Data mengenai kegiatan desa juga sering kami terima dengan keterlambatan. Maka kami kerap merasakan ketertinggalan, tidak mengetahui apa yang terjadi. Bergabung pun terasa kurang nyaman, karena sudah terlambat mengetahui. Itu yang membuat kami semakin merasa terasing, seolah-olah hidup sendiri di lokasi yang sama.	Karena berada di tempat yang terpencil dan jauh dari pusat desa, penduduk jarang menerima informasi secara cepat. Akibatnya, mereka kerap tertinggal dalam aktivitas desa dan merasakan keterasingan, seolah hidup sendiri meskipun masih berada dalam satu daerah.
10	Raba	“biasa to mangali’ngaliki ikut hadir di pertemuan warga, karena takutki dianggap hanya datang saat ada bantuan.” "Kami sebenarnya juga ingin terlibat."	Warga merasa ragu untuk ikut pertemuan karena khawatir dianggap hanya datang saat ada bantuan. Padahal sebenarnya mereka ingin ikut terlibat dalam kegiatan desa, bukan semata-mata karena bantuan.

11	Wati	<i>"itu saya kodong karna nda di kasima bantuan PKH dan semacamnya jadi saya biasa pergi menanam dan potong padi karena ndadami juga suamiku yang mau hidupika.na itu biasa hasil begituku ku putar jadi modal usaha wattuna bulan puasa kodong untuk di pke belanja hari-hari hasilnya itupun biasa nda cukup kasian"</i>	Individu ini tidak menerima bantuan PKH atau bantuan sejenis lainnya, sehingga ia harus berusaha sendiri dengan menanam dan memanen padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suaminya tidak mendukung biaya hidup. Pendapatan dari jerih payahnya dijadikan modal usaha kecil di bulan puasa, tetapi hasil yang didapat sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menjalani kehidupannya dengan banyak tantangan dan batasan.
12	Fira	<i>"karena saya ini tidak punya ijazah SMA makanya saya kerja di kota sebagai pelayan warung untuk menghidupi kebutuhan anakku dengan sendiri tanpa ada suami. Itupun biasa kodong nda cukup jdi biasa tongma itu na bantu orang tua belanjai cucunya. Na yang seharusnya itu seperti sayami ini di kasih bantuan tapi nyatanya ndadaji pernah saya terima dari pemerintah"</i>	Karena tidak memiliki sertifikat pendidikan menengah, wanita ini hanya dapat bekerja sebagai pelayan restoran di kota untuk menghidupi anaknya seorang diri tanpa suami. Pendapatannya sering kali kurang, sehingga orang tuanya terkadang harus membantu membeli kebutuhan untuk cucunya. Ia percaya bahwa dirinya merupakan orang yang pantas mendapatkan bantuan, tetapi hingga saat ini belum pernah mendapatkan dukungan apa pun dari pemerintah.
13	Maryam	<i>"Saya berharap anak-anak bisa mendapatkan pendidikan tinggi, tetapi kami tidak memiliki dana." "Walaupun sakit, kami kadang lebih memilih untuk menunggu sembuh sendiri karena takut biaya rumah sakit."</i>	Orang tua ini ingin anak-anaknya sekolah tinggi, tapi kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Untuk kesehatan pun, mereka sering menahan diri berobat karena takut tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Ini menunjukkan betapa keterbatasan ekonomi memaksa mereka mengorbankan pendidikan dan kesehatan.
14	Herul	Saya hanya menyelesaikan SD, dan karena itu saya	Karena hanya lulusan SD, ia merasa sulit mendapatkan pekerjaan atau ikut

		<p>sangat kesulitan mencari pekerjaan yang pantas. Saat terdapat peluang atau pelatihan, umumnya persyaratannya minimal adalah lulusan SMA. Walaupun saya ingin belajar dan berkembang, namun karena tidak memiliki ijazah, saya selalu terpinggirkan. Kami yang tidak berpendidikan tinggi ini sepertinya dianggap tidak mampu berkontribusi, padahal kami juga memiliki motivasi dan kemauan. Terkadang saya merasakan, pendidikan itu seperti dinding besar yang menghalangi kami untuk berkembang.</p>	<p>pelatihan yang biasanya mensyaratkan minimal lulusan SMA. Meskipun punya semangat dan keinginan untuk maju, ia tetap terpinggirkan karena tidak punya ijazah. Ia merasa pendidikan menjadi penghalang besar bagi orang seperti ini untuk berkembang dan diakui dalam masyarakat.</p>
15	RT	<p>"Ada tongmo itu biang, kalau keluarga kurang mampu ikut rapat, pasti mintaji bantuan lagi."</p>	<p>Pernyataan semacam ini mencerminkan stigma yang sering disematkan pada keluarga prasejahtera. Kehadiran mereka di forum desa atau rapat warga sering dianggap negatif, seolah-olah hanya hadir untuk menanti bantuan. Sebenarnya, banyak di antara mereka datang dengan niat yang tulus untuk terlibat, memberikan kontribusi, dan menjadi bagian dari komunitas. Stigma semacam ini bukan hanya menyakiti perasaan, tetapi juga memperdalam jarak sosial antara kelompok yang mampu dan yang tidak mampu. Sebagai akibatnya, banyak keluarga prasejahtera merasa enggan untuk hadir dalam pertemuan atau kegiatan desa karena khawatir dipandang sebelah mata atau dianggap tidak layak. Seiring berjalannya waktu, ini menimbulkan ruang keterasingan dan eksklusi sosial yang semakin meluas, di mana kelompok yang seharusnya memperoleh dukungan malah semakin</p>



			<p>merasa terpinggirkan. Ucapan itu seharusnya mencerminkan bahwa masih terdapat pola pikir yang perlu diperbaiki dalam masyarakat. Seluruh individu, tanpa memandang status ekonomi, memiliki hak untuk hadir, didengarkan, dan dihargai. Partisipasi mereka dalam aktivitas desa bukan sekadar hak, tetapi juga merupakan wujud perhatian terhadap lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, alih-alih curiga terhadap niat mereka, kita seharusnya membangun lingkungan yang bersahabat, inklusif, dan penuh penghargaan.</p>
16	San	<p><i>"waktuku itu kasian mau kasih sekolah anakku di sekolah unggulan di kota, ditanyakan adaji dekkengnukah"</i></p>	<p>mencerminkan realitas sosial yang kerap dirasakan oleh masyarakat kurang mampu saat ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Keinginan seorang orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan di kota, terhambat bukan hanya oleh persoalan biaya, tapi juga oleh sistem sosial yang tidak sepenuhnya terbuka. Pertanyaan seperti <i>"adaji dekkengnukah"</i> (apakah kamu punya orang dalam atau koneksi) menggambarkan bahwa akses ke pendidikan yang baik sering kali tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau potensi anak, tetapi juga oleh siapa yang dikenal. Situasi ini mencerminkan ketimpangan dalam sistem pendidikan, di mana harapan orang tua untuk masa depan anak bisa terganjal oleh faktor relasi sosial atau ketidakterjangkauan fasilitas. Di balik kalimat sederhana itu, tersimpan rasa kecewa dan ketidakberdayaan, karena meskipun punya niat dan semangat, mereka tetap menghadapi tembok</p>

			<p>tak terlihat yang membatasi langkah. Harapan untuk mobilitas sosial melalui pendidikan akhirnya menjadi sulit dicapai, dan ini memperkuat siklus ketimpangan yang diwariskan antargenerasi. Narasi ini bukan sekadar curahan hati, tapi sebuah cermin dari masih adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak dasar, seperti pendidikan, yang seharusnya terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial atau koneksi pribadi.</p>
17	Rahma	<p>"Anakku pernah tidak diikutsertakan lomba di sekolah karena dianggap tidak mampu membeli seragam khusus seperti yang lain." Saya sangat merasa pilu, sebab seharusnya semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. "Tapi terkadang, jika orang tua tidak memiliki uang, anaknya juga akan terpinggirkan.</p>	<p>Pernyataan ini menunjukkan bagaimana keterbatasan ekonomi orang tua secara langsung berdampak pada kesempatan anak untuk berpartisipasi di sekolah. Ketika seorang anak tidak diikutsertakan dalam lomba hanya karena tidak mampu membeli seragam khusus, itu menciptakan rasa ketidakadilan dan menyakitkan bagi orang tua. Seharusnya, sekolah menjadi ruang yang inklusif dan adil bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Namun kenyataannya, kemiskinan membuat anak-anak dari keluarga kurang mampu terpinggirkan secara tidak langsung, sehingga hak mereka untuk berkembang dan merasa setara pun ikut terabaikan.</p>



**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara ibu Mia IRT  
(Selasa, 28 Maret 2025)



Wawancara ibu Atu IRT  
(Selasa 08 April 2025)



Wawancara bapak Ansar  
(Selasa, 08 april 2025)



Wawancara bapak Uks  
(senin, 14 april 2025)



Wawancara siswa Fajri penerima bantuan seragam sekolah gratis  
(rabu, 16 april 2025)

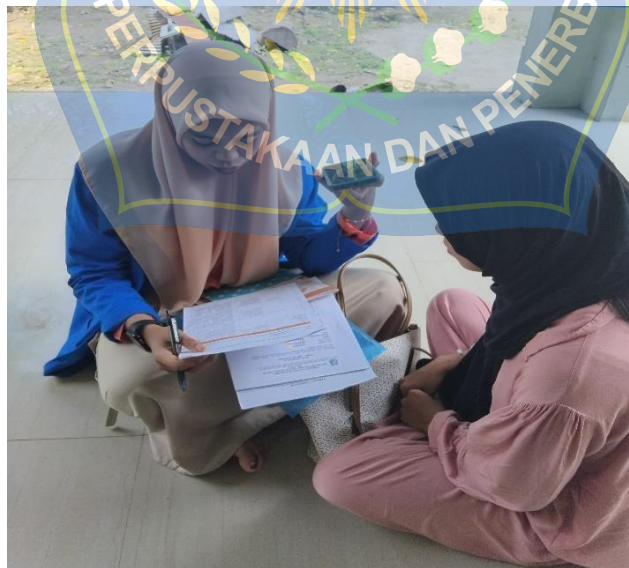


Wawancara ibu Mirna tim pengelolah pembagian seragam gratis  
(rabu, 16 april 2025)





Wawancara Ibu Watt IRT  
(Ahad, 20 april 2025)



Wawancara Pira pelayan warung  
(Senin 21 April 2025)



Ibu Maryam IRT  
(Rabu, 23 April 2025)



Ibu Rab IRT  
(Rabu, 23 april 2025)



Wawancara ibu San IRT  
(Kamis, 01 Mei 2025)



Bapak RT  
(Kamis, 01 Mei 2025)

### Schedul Penelitian

No	Kegiatan	BULAN						Ket
		I	II	III	IV	V	VI	
1.	Penyusunan Proposal							
2.	Konsultasi proposal							
3.	Ujian proposal							
4.	Penelitian Skripsi							
5.	Konsultasi Skripsi							
6.	Ujian Skripsi							







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Jalan Sultan Abdurrahman, 20554008  
Telp : 0411 848117848111 (Pusat)  
Email : k@umh.ac.id  
Web : www.umh.ac.id

### INSTRUMEN PENELITIAN

Nama : Nurwandayani  
NIM : 105381100121  
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Fatimah Azis, M.Pd.  
Pembimbing 2 : Dr. Syarifudin, M.Pd  
Judul : Eksklusi Sosial Terhadap Keluarga Prasejahtera

No	Indikator	Tanggal Validasi	Ket
1.	Kesesuaian Teori dengan Pendekatan Fokus Penelitian	17/3/2025	Sudah Selesai
2.	Relevansi Pedoman Wawancara dengan Tujuan Penelitian	17/3/2025	Sudah Selesai

CATATAN 1

Mengetahui :

Ketua Prodi  
Pendidikan Sosiologi

Dr. Abdulhadi Arifin, M.Pd.  
NIM. 1374893

Validator

Haidi Saputra, S.Pd. M.Pd.  
NIM.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 856972 Fax (0411) 963580 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6540/05/C.4-VIII/III/1446/2025

15 March 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

15 Ramadhan 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0297/PKIP/A.4-II/III/1446/2025 tanggal 14 Maret 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NURWANDAYANI

No. Stambuk : 10536 1100121

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"Eksklusi Sosial terhadap Anggota Keluarga Prasejahtera Studi Kasus Desa Padang Kabupaten Bulukumba"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Maret 2025 s/d 19 Mei 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,  
  
Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.  
NBM 1127761



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 856972 Fax (0411) 860508 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6540/05/C.4-VIII/III/1446/2025

15 March 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

15 Ramadhan 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0297/PKIP/A.4-II/III/1446/2025 tanggal 14 Maret 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURWANDAYANI

No. Stambul : 10530 1100121

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Eksklusi Sosial terhadap Anggota Keluarga Prasejahtera Studi Kasus Desa Padang Kabupaten Bulukumba"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Maret 2025 s/d 19 Mei 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sengelle No.5 Telp. (0411) 441871 Fax. (0411) 448038  
 Website : <http://hsap-new.sulawesi.go.id> Email : [psap@sulawesi.go.id](mailto:psap@sulawesi.go.id)  
 Makassar 90231

Nomor : 8166/S.01/PTSP/2025  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin penelitian  
 Kepada Yth,  
 Bupati Bulukumba

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPSM UNISMUH Makassar Nomor : 6540/02/C.4-VIII/VI/1446/2025 tanggal 15 Maret 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti di bawah ini:

Nama : **NURWANDAYANI**  
 Nomor Pokok : **197503212003121008**  
 Program Studi : **Pendidikan Sosial**  
 Penerimaan/Lembaga : **Mahasiswa**  
 Alamat : **Jl. ST Azzahra No 219, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul:

**\* EKSKLUSI SOSIAL TERHADAP KELUARGA PIRAGDI NITTA (STASI KABUK DEGA PADANG KABUPATEN BULUKUMBA)**

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 19 Maret s.d 19 Mei 2025**

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyatakan kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertuang di belakang surat izin penelitian.

Demiikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar  
 Pada Tanggal 17 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL BAH, S.H., M.Si**  
 Pangkat : **PENDAH TINGKAT I**  
 Nip : **19750321 200312 1 008**

Tersusun Yth  
 1. Ketua LPSM UNISMUH Makassar di Makassar  
 2. Perihal

Nomor: 6166/S.01/PTSP/2025

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappellitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Calle No. Hp. 082348675757, Kode Pos 92512

**SURAT IZIN PENELITIAN  
NOMOR : 135/DPMTSP/IP/III/2025**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari BAKESBANGPOL dengan Nomor: 074/0136/Bakesbangpol/II/2025 tanggal 24 Maret 2025, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	: Nurwandayani
Nomor Pokok	: 105381100121
Program Studi	: Pendidikan Sosiologi
Jenjang	: S1
Institusi	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Tempat/Tanggal Lahir	: Bulukumba / 2002-02-05
Alamat	: Palimatang Desa Padang
Jenis Penelitian	: KUALITATIF
Judul Penelitian	: EKSKLUSI SOSIAL TERHADAP KELUARGA PRA SEJAHTERA (studi kasus: Desa Padang Kabupaten Bulukumba)
Lokasi Penelitian	: DESA PADANG
Pendamping/Pembimbing	: Dr. Fatimah Azis, M.Pd. dan Dr. Syarifuddin, M.Pd.
Instansi Penelitian	: MASYARAKAT DAN KANTOR DESA PADANG
Lama Penelitian	: tanggal 18 MARET 2025 s.d 19 MEI 2025

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba, Ca. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dibuatkan di Bulukumba  
Pada Tanggal 25 Maret 2025



Pt. Kepala DPMTSP

Drs. MUHAMMAD DAUD KARAL, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV/c  
Np : 19660105 196703 1 011



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSnE), BSSN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN GANTARANG  
DESA PADANG**

Alamat : Jl. Buwung Pitua, Palimassang, No. 15 Tlp. (0413) 2585113 Kode Pos 92561

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: ~~94~~ / DP / VII / 2025

Kepala Desa Padang dengan ini menerangkan kepada:

Nama : NURWANDAYANI

NIM : 105381100121

Jurusan/Prodi : Pendidikan Sosiologi

Angkatan : 2021

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul:

**"Eksklusi Sosial Terhadap Anggota Keluarga Prasejahtera (Studi Kasus: Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba)"**

Sejak tanggal 19 Maret sampai dengan 19 Mei dan telah membahas hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 25 Juli 2025

Desa Padang







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

*Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurwandayani

Nim : 105381100121

Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	22%	25 %
3	Bab 3	4%	10 %
4	Bab 4	5%	10 %
5	Bab 5	3%	10 %
6	Bab 6	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 07 Agustus 2025

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurulhikmah S. Hum, M.P.  
 NBM 964 591

BAB | nurwandayani 105381100121

## ORIGINALITY REPORT

	9%	7%	2%	%
	SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES				
1	doaj.org Internet Source			2%
2	Emilia Kristiyanti, "Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus di DKI Jakarta", Indonesian Journal of Religion and Society, 2019 Publication			2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source			2%
4	text-id.123dok.com Internet Source			2%
5	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source			2%

E  
S  
F  
V  
C

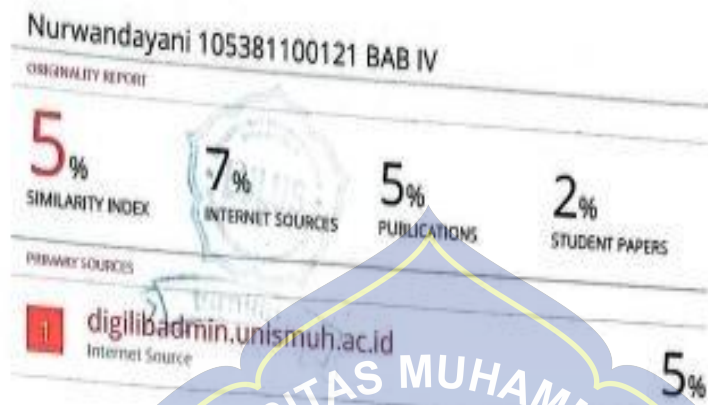
Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches:







Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Nurwandayani 105381100121 BAB V

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.kompasiana.com Internet Source	<1%
2	www.shnews.co Internet Source	<1%
3	feburarycalendar.netlify.app Internet Source	<1%
4	Heintje Barry Kobstan, Doddy Ariawan. "MENERJEMAHKAN AJARAN KRISTUS KE DALAM TINDAKAN SOSIAL", Jurnal Penggerak, 2025 Publication	<1%
5	godiscover.co.id Internet Source	<1%
6	www.scribd.com Internet Source	<1%
7	jaluhertambang.blogspot.com Internet Source	<1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
9	geograf.id Internet Source	<1%
10	a-research.upi.edu Internet Source	<1%



## BAB VI nurwandayani 105381100121

## ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX  
2% INTERNET SOURCES  
2% PUBLICATIONS  
% STUDENT PAPERS

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCES PRINTED)

2%

★ Delly Maulana. "Kolaborasi Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kota Serang", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2025

Publication

Exclude quotes

On

Exclude matches

+2%

Exclude bibliography

On



## RIWAYAT HIDUP



Nurwandayani, lahir di Bulukumba, 05 Februari 2002.

Merupakan anak sulung dari dua bersaudara.,buah hati dari pasangan ayahanda Agus dan Ibunda Sulmaeni Tawil.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Formal pada tahun 2008 di SD Negeri 232 Dampang dan lulus pada tahun

2014, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) di MTsN 1 Bulukumba Tengah lulus pada tahun 2017 kemudian melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Guppi Gunung Jati dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 penulis mendaftar diperguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengambil jurusan Pendidikan Sosiologi, program studi strata 1 (S1) dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 105381100121. Pengalaman organisasi 2022-2023 sebagai Anggota Minat dan Bakat HIMA Prodi Pendidikan Sosiologi. Pada tahun 2023-2024 sebagai wakil Bendahara umum HIMA Prodi Pendidikan Sosiologi, dan Ketua Bidang Pengembangan Organisasi UKM-Olahraga Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2024-Sekarang.